



PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PRIGI
SOLUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2025

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi



KATA PENGANTAR

”



Abdul Iman, S.St.Pi, M.Pi
Plt. Kepala PPN Prigi

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi disusun untuk melaporkan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Periode Tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2025.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan kinerja di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih ditingkatkan, baik pelaksanaan tugas dan fungsi maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan kinerja di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih ditingkatkan, baik pelaksanaan tugas dan fungsi maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Trenggalek, 15 Januari 2026
Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdul Iman

DAFTAR ISI

	Page
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan	3
1.3. Tugas dan Fungsi	4
1.4. Aspek Strategis	5
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis 2025–2029	7
2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8
2.3. Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10
2.4. Target Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2. Analisis Capaian Kinerja	15
3.3. Akuntabilitas Keuangan	76
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	78
4.2. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	79
4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Page
Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Tahun 2025	11
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2025 ...	14
Tabel 3. Capaian IK "Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Prigi" Tahun 2025	15
Tabel 4. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK "Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Prigi"	19
Tabel 5. Capaian IK "Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Prigi" Tahun 2025	20
Tabel 6. Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025	21
Tabel 7. Capaian IK "Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa /Dievaluasi di PPN Prigi" Tahun 2025	25
Tabel 8. Perhitungan Capaian IK "Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa /Dievaluasi di PPN Prigi" Tahun 2025	25
Tabel 9. Perbandingan Jumlah Usulan Permohonan Pengusahaan di PPN Prigi Tahun 2023 - 2025	26
Tabel 10. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK "Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa/Dievaluasi di PPN Prigi"	27
Tabel 11. Capaian IK "Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Tahun 2025	28
Tabel 12. Capaian IK Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi per Bulan Tahun 2025	29
Tabel 13. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK "Tingkat Kinerja PPN Prigi"	31
Tabel 14. Capaian IK "Tingkat Pelayanan Kesyahbandara di PPN Prigi" Tahun 2025	32
Tabel 15. Perhitungan Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2025	32
Tabel 16. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK "Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Prigi"	35
Tabel 17. Capaian IK "Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Prigi" Tahun 2025	36
Tabel 18. Capaian IK "Nilai Pengendalian Lingkungan PPN Prigi" Tahun 2025	38
Tabel 19. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran "Nilai Pengendalian Lingkungan PPN Prigi"	39
Tabel 20. Capaian IK "Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan"	40
Tabel 21. Rekapitulasi Kapal Perizinan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	41

	Page
Tabel 22. Capaian IK “Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan”	43
Tabel 23. Perhitungan Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan..	44
Tabel 24. Capaian IK “Nilai PM Pembangunan ZI WBK PPN Prigi” Tahun 2025	46
Tabel 25. Capaian IK Nilai PM Pembangunan ZI WBK PPN Prigi per Komponen	47
Tabel 26. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Nilai PM Pembangunan ZI WBK PPN Prigi”	49
Tabel 27. Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Prigi” Tahun 2025	50
Tabel 28. Komponen Penilaian Mandiri SAKIP	51
Tabel 29. Capaian IK “Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2025.	51
Tabel 30. Nilai PM SAKIP PPN Prigi per Komponen Tahun 2025	52
Tabel 31. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”	55
Tabel 32. Capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2025	56
Tabel 33. Capaian IK “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2025	59
Tabel 34. Hasil Perhitungan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	60
Tabel 35. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2025	60
Tabel 36. Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2025	61
Tabel 37. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”	62
Tabel 38. Capaian IK “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2025	64
Tabel 39. Capaian IK “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2025	65
Tabel 40. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”	68
Tabel 41. Capaian IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2025	70
Tabel 42. Detail Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025	71

	Page
Tabel 44. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”	71
Tabel 45. Penyerapan Anggaran berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Utama Tahun 2025	76
Tabel 46. Penyerapan Anggaran berdasarkan Sssaran Kegiatan Tahun 2025	77

DAFTAR GAMBAR

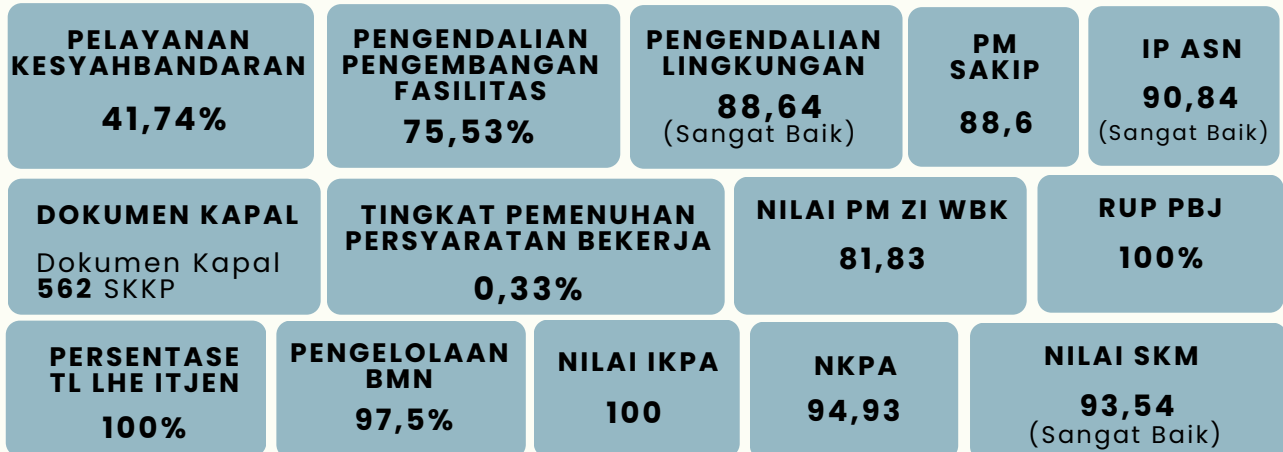
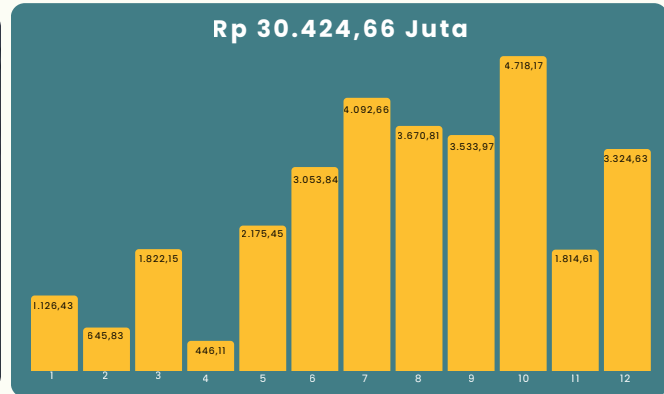
	Page
Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	5
Gambar 2. Dashboard Kinerja Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	13
Gambar 3. Realisasi PNB Non SDA per Jenis Jasa di PPN Prigi Tahun 2025	16
Gambar 4. Realisasi PNB Non SDA per Bulan Tahun 2025	16
Gambar 5. Perbandingan Capaian PNB Non SDA Tahun 2020-2025	17
Gambar 6. Upaya Peningkatan Pencapaian PNB Non SDA Tahun 2025	18
Gambar 7. Volume Produksi Perikanan Tangkap per Jenis API Tahun 2025	19
Gambar 8. Perbandingan Volume Produksi Perikanan Tangkap per Bulan Tahun 2025	20
Gambar 9. Perbandingan Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020 - 2025	20
Gambar 10. Kegiatan Enumerasi Hasil Tangkapan di PPN Prigi	24
Gambar 11. Kegiatan Penandatanganan Sewa Tanah dan Bangunan serta Sosialisasi Pemanfaatan Tanah dan Bangunan di Kawasan PPN Prigi	27
Gambar 12. Perbandingan Capaian Nilai Tingkat Kinerja PPN Prigi Tahun 2020 - 2025	30
Gambar 13. Perbandingan Persentase Indikator Tingkat Kinerja Pelayanan Kesyahbandaran Tahun 2024 dan 2025	33
Gambar 14. Kegiatan Cek Teknis Nautis Kapal serta Monev Pelaksanaan Gerai Kapal Perikanan dan Perizinan Berusaha	34
Gambar 15. Kegiatan Pengendalian Lingkungan PPN Prigi	39
Gambar 16. Persentase Penerbitan SKKP di PPN Prigi dan Pelabuhan Perikanan Binaan	42
Gambar 17. Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan	42
Gambar 18. Kegiatan Identifikasi Kapal Perikanan dan Non Kapal Perikanan serta Pembinaan Izin Usaha Perikanan	45
Gambar 19. Perbandingan Nilai PM Pembangunan ZI PPN Prigi Tahun 2020 -2025	49
Gambar 20. Kegiatan Monev Pembangunan ZI dan Kegiatan Proker Agen Perubahan	50
Gambar 21. Perbandingan Capaian Nilai PM SAKIP Tahun 2020 - 2025	53
Gambar 22. Kegiatan Pengelolaan Kinerja PPN Prigi	56
Gambar 23. Perbandingan Capaian IP ASN Tahun 2020 - 2025	58
Gambar 24. Perbandingan Capaian Tingkat Pengelolaan BMN Tahun 2021 - 2025	64
Gambar 25. Perbandingan Capaian IKPA Tahun 2020 - 2025	67
Gambar 26. Detail Nilai SKM per Unsur Tahun 2025	73
Gambar 27. Perbandingan Capaian Nilai SKM Tahun 2020 - 2025	75
Gambar 28. Reviu Standar Pelayanan dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025	76

EXECUTIVE SUMMARY

PNBP NON SDA



PNBP SDA



PRESTASI

- Pelabuhan Perikanan Peringkat Ketiga dalam Pelaksanaan Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan pada Tahun Anggaran 2024;
- Unit Organisasi Berpredikat Informatif dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
- Nilai Pencapaian NPSS dengan predikat Istimewa di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024;
- Partisipasi dan Kontribusi dalam Penyampaian Pelaporan Data dan Informasi Ketersediaan Ikan di Cold Storage melalui Sistem Informasi Pengelolaan Cold Storage (SIPCS) dan google form;
- Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I T.A. 2025 dengan Predikat "TERBAIK"
- Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dengan Kategori Sangat Baik Bulan Januari - Desember 2025;

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 13.167.885.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 13.054.504.368,00 atau mencapai 99,14%. Secara kinerja, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 112,26% (Istimewa).

Hal ini didukung oleh pencapaian Sasaran kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, dimana pada tahun 2025 terdapat 5 (lima) SK dan 18 (delapan belas) IK dengan capaian $\geq 100\%$. Adapun capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2025 sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2025	TW IV	TW IV	%
1	Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.540,58	1.540,58	2.277,59	147,84
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	11.671	11.671	11.898,55	101,95
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3 Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100	100	100	100
		4 Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84	84	98,67	117,46
		5 Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	40	40	41,74	104,35
		6 Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70	70	75,53	107,90
		7 Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	30,10	30,10	88,64	194,49
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal penangkap dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Prigi	8 Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	502	502	562	111,95
		9 Tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan (nilai)	0,26	0,26	0,33	126,92

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2025	TW IV	TW IV	%
5	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10 Nilai PM pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	75,5	75,5	81,83	108,38
		11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	85	85	100	117,65
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	88	88	88,6	100,68
		13 Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	87	87	90,84	104,41
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	76	76	100	131,58
		15 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	81	81	97,5	120,37
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	92	92	100	108,69
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	71,5	71,5	94,93	132,78
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	88,5	88,5	93,54	105,70

Untuk meningkatkan kinerja selanjutnya, seluruh tim kerja sebagai penanggung jawab IK dan Tim Pengelola Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi agar melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian periode berikutnya. Komitmen dan tanggungjawab pimpinan dan seluruh pegawai di lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi diharapkan dapat mendukung kinerja yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.



PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PRIGI
SOLUTIF



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja. Sistem Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk memperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pemenuhan kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Program pengelolaan perikanan dan kelautan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025 yang pertanggungjawabannya harus dilakukan secara akuntabel dan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulanan dan tahunan). Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan salah satu dari 22 (dua puluh dua) Pelabuhan Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap, pada tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi melaksanakan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

- Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
- Pengelolaan Sumber Daya Ikan
- Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni: (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang disusun secara periodik (setiap Triwulan dan Tahun).

Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2025 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) bisa diwujudkan.

1.2. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang Pelabuhan Perikanan;
- Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan log book penangkapan ikan;
- Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- Pelaksanaan penerbitan sertifikasi hasil tangkapan ikan;
- Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan dan pemasaran serta distribusi hasil perikanan;
- Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- Pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan; dan
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Adapun susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51/KEPMEN-KP/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN-KP/2020 tentang Peta Jabatan dan Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

1.4. Aspek Strategis

Aspek Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam mendukung kebijakan pembangunan perikanan tangkap Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan renstra DJPT adalah sebagai berikut:

- Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan;
- Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, menyajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai visi, misi, dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, dan targetnya) dalam Rencana Jangka Menengah (RPJM/Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan Penetapan Kinerja (PK) pada periode triwulan tertentu.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran / tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

Bab IV Penutup, pada bagian ini diuraikan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi, tindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya, serta rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran, pada bagian ini dilampirkan dokumen perjanjian kinerja, penghargaan yang diperoleh, serta dokumen kinerja lainnya.



PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2025 – 2029

Indonesia, sebagai salah satu negara maritim terbesar dunia, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. Hal tersebut merupakan modal dasar yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju, berdaulat, adil, dan makmur serta sebagai sebuah bangsa yang tangguh dalam hal politik, keamanan sosial, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2029.

Kegiatan pembangunan subsektor perikanan tangkap di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan dan sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta mendukung pencapaian delapan misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

Pencapaian Indonesia Emas 2045 merupakan sebuah keniscayaan apabila menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai episentrum pembangunan nasional, mengingat potensi sumber daya perairan yang sangat besar. Orientasi pembangunan sudah semestinya beralih ke sektor kelautan dan perikanan dengan menjadikan sektor ini sebagai poros penggerak pembangunan dan perekonomian nasional, transformasi pendekatan pembangunan yang sebelumnya hanya berorientasi pada peningkatan produksi menjadi pendekatan pembangunan secara terukur dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta berorientasi pada permintaan pasar yang menempatkan ekologi sebagai panglima. Transformasi pendekatan diimplementasikan ke dalam lima arah kebijakan pembangunan Ekonomi Biru yaitu: 1) Memperluas kawasan konservasi laut; 2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; 3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; 4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah “Terwujudnya Tata Kelola Perikanan Tangkap yang Partisipatif, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Nelayan” untuk mewujudkan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan kedalam misi, strategi, dan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melaksanakan misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan fokus misi Asta Cita ke-2: Swasembada pangan dan ekonomi biru.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:

- Menjamin kelestarian sumber daya ikan melalui penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan pengawasan berbasis wilayah pengelolaan;
- Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan ikan melalui pemanfaatan teknologi, modernisasi armada, dan integrasi sistem logistik hasil tangkapan;
- Mengembangkan infrastuktur pelabuhan perikanan sebagai simpul layanan terpadu dan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan;
- Memperkuat kelembagaan, perlindungan, dan pemberdayaan nelayan, termasuk nelayan kecil, perempuan, dan pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing;
- Meningkatkan tata kelola perikanan tangkap yang transparan dan akuntabel, melalui penguatan regulasi, perizinan, pemantauan, serta sistem data dan informasi perikanan.

2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi menerapkan strategi dengan menetapkan Sasaran Kegiatan yang dapat digunakan sebagai acuan selama lima tahun sebagai suatu *outcome/impact* dari program kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan bagian dari Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam operasional organisasi, dengan pengukuran & penilaian

kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 **“Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan” dengan Indikator Kinerja: Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
2. Sasaran Kegiatan 2 **“Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Meningkat”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja: Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
3. Sasaran Kegiatan 3 **“Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Tangkap “Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:
 - Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 - Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.
4. Sasaran Kegiatan 4 **“Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 “Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:
 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan;
 - Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan.
5. Sasaran Kegiatan 5 **“Terwujudnya Layanan Dukungan Manjerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap”, dengan Indikator Kinerja:
 - Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;

- Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; dan
- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

2.3. Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator kinerja merupakan nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan.

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Tujuan umum Perjanjian Kinerja adalah 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 4) Sebagai dasar pemberian penghargaan dan atau sanksi (*reward and punishment*). Penetapan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

2.4. Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian pencapaian tujuan / sasaran atau indikasi atau ciri-ciri bahwa kinerja tercapai. Target adalah target kinerja atas indikator, sedangkan program/kegiatan adalah cara untuk mencapai target kinerja.

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran dengan dilengkapi indikator kinerja yang akan dicapai. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kegiatan kinerja spesifik yang akan dicapai meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.540,58
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	11.671
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	84
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	40
		6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	30,10
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	502
		9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	75,5
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (Persen)	85
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	88
		13 Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	87
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	76
		15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	81
		16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	92
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	71,5
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	88,50

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran dengan dilengkapi indikator kinerja yang akan dicapai. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kegiatan kinerja spesifik yang akan dicapai meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kegiatan pendukung tersebut terdapat pada dokumen Rencana Aksi sebagaimana terdapat pada **Lampiran 2**.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi unit kerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi harus dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya, baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Hal tersebut sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung jawab dimana instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertahankan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kegiatan pembangunan perikanan tangkap tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi menitikberatkan pada 5 (lima) Sasaran Kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



Gambar 2. Dashboard Kinerjaku Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi triwulan IV tahun 2025 memiliki kategori "ISTIMEWA", ditandai dengan Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 112,26%. Capaian ini merupakan gambaran nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada triwulan IV tahun 2025, seluruh indikator kinerja atau sebanyak 18 (delapan belas) indikator kinerja tercapai ($\geq 100\%$). Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja (IK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2025	TW IV	TW IV	%
1	Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.540,58	1.540,58	2.277,59	147,84
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	11.671	11.671	11.898,55	101,95
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3 Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100	100	100	100
		4 Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84	84	98,67	117,46
		5 Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	40	40	41,74	104,35
		6 Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70	70	75,53	107,90
		7 Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	30,10	30,10	88,64	294,49
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8 Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	502	502	562	113,76
		9 Tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan (Nilai)	0,26	0,26	0,33	126,92
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10 Nilai PM pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	75,5	75,5	81,83	108,38
		11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	85	85	100	117,60
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	88	88	88,60	100,68
		13 Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	87	87	90,84	104,41
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	76	76	100	131,58
		15 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	81	81	97,5	120,37
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	92	92	100	108,69
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	71,5	71,5	94,93	132,76
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	88,50	88,50	93,54	105,70

3.2. Analisa Capaian Kinerja

Pada periode tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Kegiatan (SK) 1 - Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator Kinerja (IK) pada SK 1 yaitu Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Indikator Kinerja (IK) 1 - Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi/badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan/pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara di sektor kelautan dan perikanan. PNBP PPN Prigi terdiri atas penerimaan umum dan fungsional.

Penghitungan nilai PNBP sektor perikanan tangkap di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan periode penilaian tahunan.

Tabel 3. Capaian IK “Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Triwulan IV 2025

SK 1		Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
IK 1		Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
Realisasi Tahun 2020- 2024					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
644,23	973,35	1.646,04	1.945,04	2.059,87	1.540,58	2.277,59	147,84%	1.540,58	147,84%	

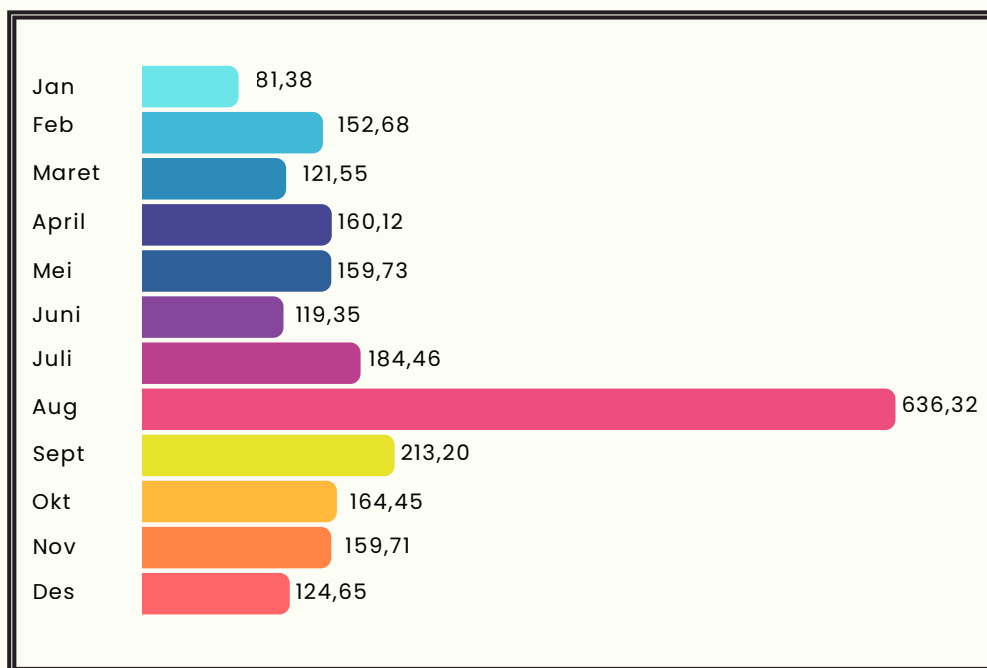
Pada triwulan IV tahun 2025, capaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” sebesar Rp 1.831,52 juta atau sebesar 150,62% dari target triwulan IV tahun 2025. Penerimaan PNBP Non-SDA terdiri dari PNBP Fungsional dan PNBP Umum. PNBP fungsional terdiri atas pendapatan penggunaan sarana prasarana sesuai TUSI dan pendapatan jasa pelabuhan perikanan. Sedangkan, PNBP umum terdiri atas pendapatan dari penjualan peralatan & mesin, pendapatan pengembalian

belanja pegawai, pendapatan penerimaan kembali belanja barang, serta pendapatan jasa lainnya. Persentase realisasi PNBP Non-SDA per Jenis Jasa di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



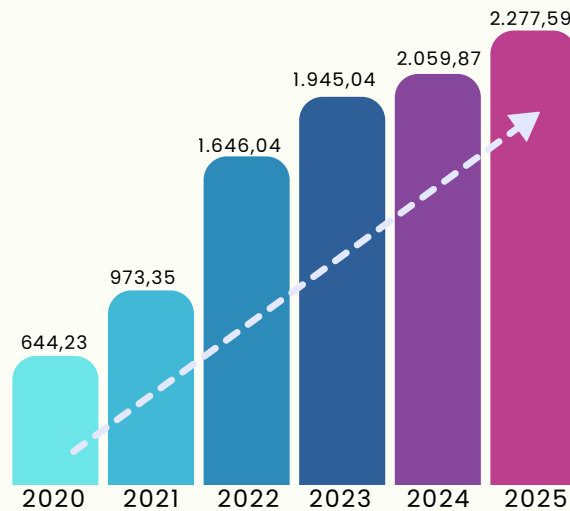
Gambar 3. Realisasi PNBP Non-SDA per Jenis Jasa Tahun 2025

Realisasi PNBP Non-SDA terbesar pada pelayanan penggunaan peralatan dan mesin (*freezer* dan *cold storage*) sebesar Rp 643,56 juta (25,5% dari total PNBP tahun 2025). Tingginya PNBP Non-SDA pada pelayanan penggunaan peralatan dan mesin (*freezer* dan *cold storage*) pada tahun 2025 didukung oleh adanya pembekuan produk samping ikan patin (*belly*, kulit, dan kepala) secara kontinu / tidak bergantung pada musim. Selain itu, pelayanan petugas operator ruang pendingin yang melaksanakan pelayanan setiap saat menyesuaikan dengan permintaan pengguna jasa.



Gambar 4. Realisasi PNBP Non-SDA per Bulan Tahun 2025

Penerimaan PNBP Non-SDA tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2025, dimana pada bulan Agustus terdapat penambahan PNBP umum pada pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin.



Gambar 5. Perbandingan Capaian PNBP Non-SDA Tahun 2020-2025

Berdasarkan grafik Perbandingan Capaian PNBP PPN Prigi Triwulan IV Tahun 2020-2025, terlihat adanya tren peningkatan signifikan dalam penerimaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari tahun ke tahun.

Peningkatan capaian PNBP Non-SDA pada periode 2020-2025 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5 berkaitan erat dengan diberlakukannya PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mulai efektif pada akhir 2021. Regulasi ini melakukan penataan ulang dan penyesuaian tarif layanan KKP agar lebih mencerminkan nilai ekonomi, sekaligus memperjelas klasifikasi jenis PNBP Non-SDA seperti perizinan, pelayanan kepelabuhanan, sertifikasi, dan pemanfaatan sarana prasarana, sehingga meningkatkan kepastian hukum dan kepatuhan pengguna layanan. Dampaknya terlihat jelas pada lonjakan signifikan capaian tahun 2022 serta pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan hingga 2025, yang menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tersebut berfungsi sebagai faktor struktural utama dalam optimalisasi pemungutan PNBP Non-SDA dan penguatan kontribusi penerimaan negara.

Dibandingkan dengan target Renstra, capaian penerimaan PNBP triwulan IV 2025 mencapai sebesar 147,84%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu) (Rp 2.511,65 juta), capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebesar 90,68%. Hal ini disebabkan tingginya penerimaan PNBP PPN Palabuhanratu pada pemanfaatan lahan, gedung, dan bangunan dan penerimaan jasa tambat kapal perikanan. Dibandingkan dari segi jumlah kontrak, PPN Palabuhanratu

263,16% lebih banyak. Selain itu, beberapa kontrak memiliki jangka waktu lima tahun dan habis kontrak pada tahun 2025.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Penerimaan PNB Non-SDA antara lain:

- Komitmen para petugas pelayanan jasa;
- Adanya penerimaan PNB umum bersumber dari penjualan peralatan dan mesin pada bulan Agustus sebesar Rp 408,34 juta;
- Adanya penambahan investor/mitra usaha baru sehingga mendukung peningkatan pendapatan pemanfaatan tanah bangunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian Indikator Kinerja Penerimaan PNB Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yaitu:

- Penurunan pendapatan *cold storage* sebesar 53,34% dikarenakan pengguna memiliki *cold storage* sendiri;
- Penurunan pendapatan tambat labuh sebesar 68,46% disebabkan meningkatnya kapal *docking* (perbaikan kapal dan alat tangkap);
- Penurunan pendapatan pas masuk sebesar 7% disebabkan menurunnya pengunjung, baik nelayan maupun umum untuk melakukan aktivitas perikanan dan aktivitas lainnya.

Menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian PNB triwulan IV, maka upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026 antara lain melakukan monitoring dan evaluasi kepada petugas pelayanan jasa, melakukan perbaikan menyeluruh atau penggantian baru baik mesin dan peralatan di *cold storage* sebagai upaya peningkatan pelayanan, melakukan koordinasi dengan petugas kesyahbandaran terkait kegiatan tambat labuh kapal.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 antara lain monitoring dan evaluasi pengguna jasa, rekonsiliasi data tambat labuh, dan kegiatan pendukung lainnya.



Gambar 6. Upaya Peningkatan Pencapaian PNB Non-SDA Tahun 2025

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Prigi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Penerimaan PNBP Non-SDA di PPN Prigi	147,84%	603.602.000	599.194.849	892.363.836	292.448.987
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ = $\frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				48,45%	
Nilai Efisiensi = $50\% + \left(\frac{ERO}{20} \times 50\right)$ = $50\% + \left(\frac{48,5\%}{20} \times 50\right)$				171,13%	

Pencapaian IK 1 didukung oleh anggaran sebesar Rp 603.602.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi anggaran sebesar Rp 599.194.849,00 atau 99,39% dengan efisiensi 48,45% dan nilai efisiensi 171,13%.

Dalam pencapaian IK 1, didukung oleh 13 (tiga belas) orang SDM dengan 8 (delapan) pelayanan. Adanya Sistem Jasa Kepelabuhanan (SIJAKA) yang terintegrasi dengan aplikasi teman SPB dan Simponi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran tambat labuh serta meningkatkan efisiensi penggunaan waktu dan SDM.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu pelabuhan perikanan UPT pusat dan perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar melalui kegiatan: Pelayanan perusahaan pelabuhan perikanan; Operasional dan pelaksanaan PNBP pasca produksi dan Penangkapan Ikan Terukur (PIT); kegiatan PNBP pasca produksi, PIT, dan Kampung Nelayan Merah Putih; Pemeliharaan sarana penunjang PNBP.

3.2.2. Sasaran Kegiatan (SK) 2 - Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Meningkat

Indikator Kinerja (IK) pada SK 2 yaitu Penerimaan Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

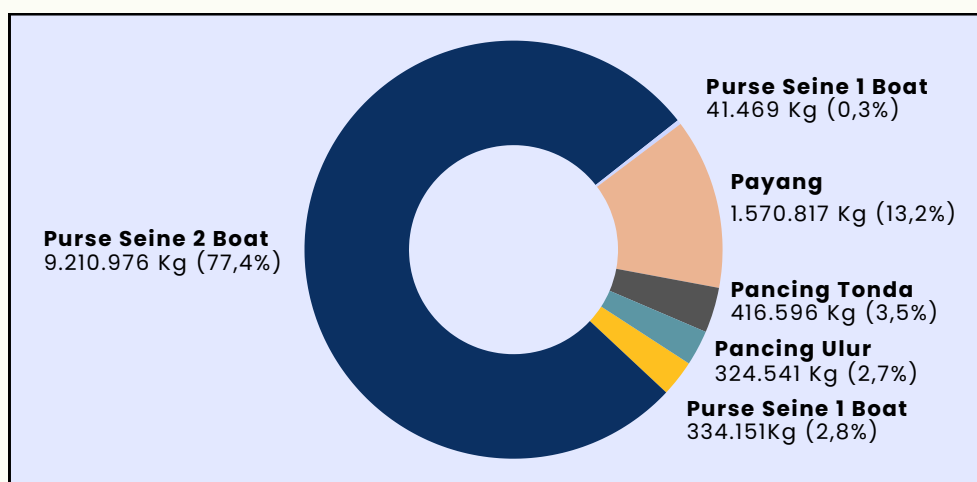
Indikator Kinerja (IK) 2 - Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Volume produksi perikanan tangkap merupakan jumlah produksi perikanan tangkap yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Pengumpulan data produksi dilakukan oleh petugas Enumerator. Pendataan dilaksanakan dengan pencacahan lengkap menggunakan form monitoring data produksi harian. Data yang telah terkumpul kemudian diolah oleh pengolah, diverifikasi, dan divalidasi serta dilaporkan secara berkala.

Tabel 5. Capaian IK "Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Triwulan IV 2025

SK 2		Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Meningkat								
IK 2		Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
Realisasi Tahun 2020– 2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
24.928,23	21.392,42	13.322,16	26.535,13	20.918,45	11.671	11.898,55	101,95%	17.054	69,77%	

Capaian indikator kinerja "Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" pada triwulan IV 2025 sebesar 11.898,55 Ton atau 101,95% dari target triwulan IV 2025. Volume produksi per alat tangkap dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



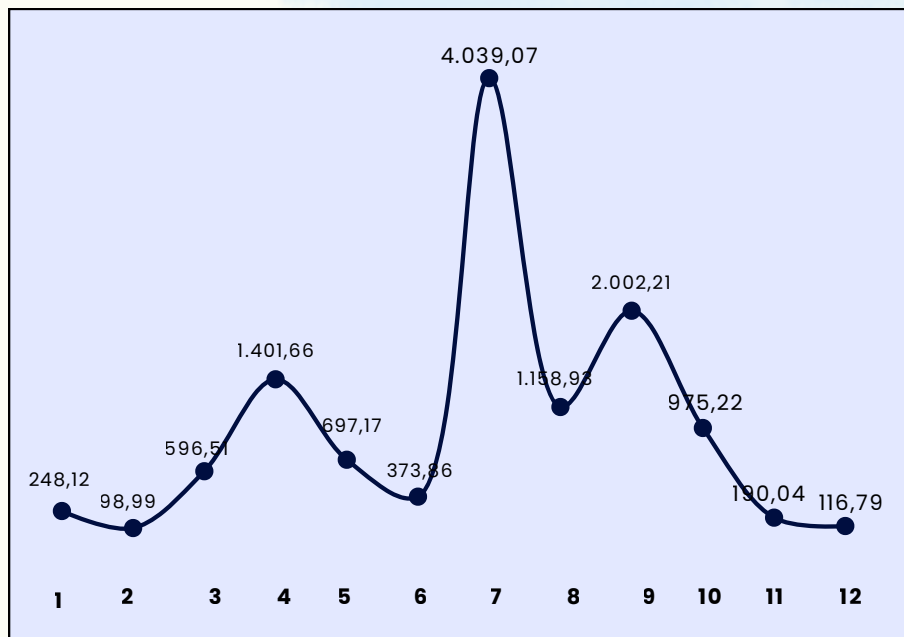
Gambar 7. Volume Produksi Perikanan Tangkap per Jenis API

Volume produksi perikanan pada tahun 2025 didominasi oleh alat tangkap *Purse Seine 2 Boat* sebesar 9.210.976 Kg (77,4%) dari total produksi, menandakan tingginya efektivitas dan intensitas operasi alat tangkap ini.

Data volume produksi perikanan tangkap tahun 2025 dirinci berdasarkan jenis alat tangkap dan periode bulan. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi masing-masing alat tangkap, meliputi *purse seine* (1 *boat* dan 2 *boat*), jaring insang, payang, pancing tonda, dan pancing ulur, terhadap total produksi perikanan tangkap sepanjang tahun. Informasi ini penting sebagai dasar analisis pola produksi musiman, efektivitas penggunaan alat tangkap, serta sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan dan pengelolaan perikanan tangkap secara berkelanjutan. Volume produksi perikanan tangkap per bulan per jenis alat tangkap tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

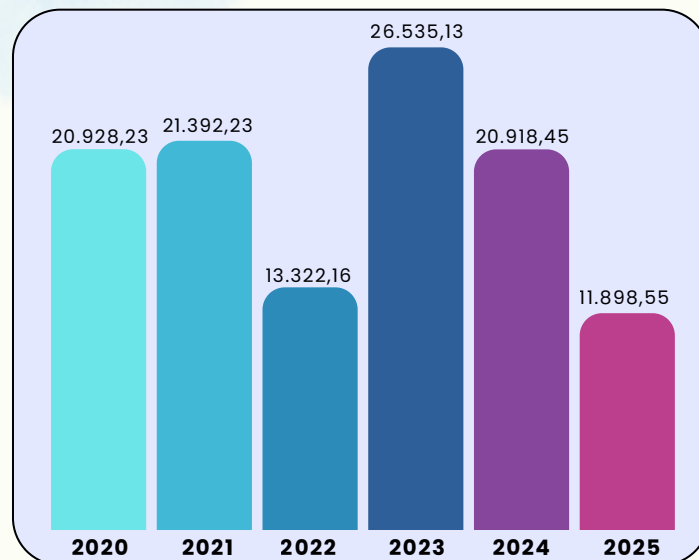
Tabel 6. Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025

No	Bulan	Volume Produksi per Alat Tangkap (Kg)						Jumlah
		Purse Seine 1 Boat	Purse Seine 2 Boat	Jaring Insang	Payang	Pancing Tonda	Pancing Ulur	
1	Januari	9.522	189.339	5.460	7.365	22.585	28.844	248.115
2	Februari	2.632	44.675	5.004	4.191	20.599	21.887	98.988
3	Maret	15.476	507.019	3.107	5.440	46.848	18.624	596.514
4	April	12.979	1.056.466	1.721	223.709	28.237	78.544	1.401.656
5	Mei	34.824	571.114	747	43.976	32.099	14.406	697.166
6	Juni	39.972	255.074	250	40.442	32.980	5.144	373.862
7	Juli	79.215	3.032.689	2.723	847.241	61.877	15.321	4.039.066
8	Agustus	37.801	668.299	2.598	345.522	62.439	42.271	1.158.930
9	September	32.023	1.858.866	1.691	17.112	59.208	33.311	2.002.211
10	Oktober	26.694	889.289	3.381	3.225	34.212	18.417	975.218
11	November	6.648	90.716	8.529	28.746	17.740	37.656	190.036
12	Desember	47.430	47.430	6.258	3.848	8.772	14.116	116.789
Jumlah		334.151	9.210.976	41.469	1.570.817	416.596	324.541	11.898.550



Gambar 8. Volume Produksi Perikanan Tangkap per Bulan Tahun 2025

Fluktuasi volume produksi perikanan bulanan tahun 2025 menunjukkan pola musiman yang sangat jelas dan berkorelasi kuat dengan dinamika oseanografi di perairan selatan Jawa, khususnya Jawa Timur. Produksi relatif rendah pada Januari–Februari, meningkat mulai Maret, kemudian mencapai puncak utama pada Juli (4,04 juta kg) dan tetap tinggi pada September, sebelum kembali menurun tajam pada November–Desember. Pola ini sejalan dengan siklus monsun dan proses *upwelling* di Samudra Hindia selatan Jawa. Pada Musim Barat (Desember–Februari), angin barat dominan menyebabkan gelombang tinggi, arus permukaan menuju pantai, serta kondisi perairan yang kurang kondusif bagi operasi penangkapan, sehingga produksi rendah. Memasuki musim peralihan I (Maret–Mei), kondisi laut mulai membaik dan produktivitas meningkat secara bertahap. Puncak produksi terjadi pada Musim Timur (Juni–September), terutama Juli–September yang bertepatan dengan *upwelling* kuat di selatan Jawa Timur akibat angin timur yang mendorong massa air permukaan menjauh dari pantai, digantikan oleh air dingin kaya nutrisi dari lapisan bawah. Kondisi ini meningkatkan klorofil-a dan kelimpahan ikan pelagis. Hal ini tercermin dari lonjakan signifikan produksi, terutama alat tangkap purse seine 2 boat dan payang. Kemudian, pada peralihan II (Oktober – November) hingga awal Musim Barat, intensitas *upwelling* melemah, kondisi oseanografi menjadi kurang stabil, dan produksi kembali menurun. Dengan demikian, variasi produksi bulanan tahun 2025 secara konsisten mencerminkan respons perikanan tangkap terhadap variabilitas oseanografi musiman di perairan selatan Jawa Timur.



Gambar 9. Perbandingan Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2025

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, volume produksi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1.423,61 – 14.636,58 Ton atau 10,69 – 55,16%. Penurunan produksi yang terjadi berbanding lurus dengan jumlah frekuensi kunjungan kapal. Perbandingan data kunjungan atau trip kapal menunjukkan bahwa pada 2025 terjadi penurunan total trip dibandingkan 2024, dari 15.245 trip menjadi 12.806 trip atau turun sekitar 16,0%. Penurunan terutama diakibatkan oleh berkurangnya trip berhasil (*sucessed trip*) yang menurun signifikan dari 11.340 trip (74,4%) pada 2024 menjadi 8.377 trip (65,4%) pada 2025. Sebaliknya, trip gagal (*failed trip*) justru meningkat cukup signifikan dari 3.905 menjadi 4.429 trip, serta secara proporsional dari 25,6% menjadi 34,6%. Kondisi ini mengindikasikan penurunan efektivitas operasi penangkapan kapal pada 2025, yang dapat dipengaruhi oleh faktor kondisi cuaca dan oseanografi yang kurang mendukung, penurunan ketersediaan sumber daya ikan, maupun kendala operasional dan ekonomi, sehingga tidak hanya menekan jumlah kunjungan kapal, tetapi juga menurunkan tingkat keberhasilan trip.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra (17.054 ton), capaian volume produksi perikanan tangkap tahun 2025 mencapai 69,77%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian PPN Palabuhanratu (7.681,36 ton), capaian PPN Prigi sebesar 154,90%.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu dilakukannya pendataan produksi yang optimal dengan sistem *shift* yang dilakukan selama 24 jam sehingga meminimalisir terjadinya *data losses*. Selain itu, dukungan infrastruktur perikanan seperti fasilitas pelabuhan, ketersediaan perbekalan kapal (BBM, es, dll), ketersediaan fasilitas *cold storage*, serta pemasaran hasil perikanan juga mendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Kondisi oseanografi yang tidak mendukung kegiatan penangkapan, seperti pola angin musiman, *downwelling*, suhu permukaan laut, ketersediaan klorofil-a;
- Kondisi cuaca dan keselamatan pelayaran (curah hujan, kecepatan angin, dan arus/gelombang tinggi) yang tidak memungkinkan intensitas trip optimal.

Upaya yang akan dilaksanakan antara lain melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait sistem pendataan produksi perikanan tangkap serta validasi data hasil tangkapan ikan di PPN Prigi. Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain validasi data internal terkait kesesuaian hasil tangkapan dengan alat tangkap yang digunakan, serta pengolahan dan validasi data statistik nasional.



Gambar 10. Kegiatan Enumerasi Hasil Tangkapan

Pada tahun 2025, tidak terdapat dukungan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja ini. Dalam pencapaian indikator kinerja ini, didukung oleh 13 (tiga belas) orang SDM yang terdiri dari 8 (delapan) orang enumerator, 3 (tiga) orang pengolah data, dan 2 (dua) orang validator. Sedangkan program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian IK 2 yaitu program layanan data dan informasi dengan kegiatan layanan data statistik kelautan dan perikanan.

3.2.3. Sasaran Kegiatan (SK) 3 – Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Indikator Kinerja (IK) pada SK 3 yaitu Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Indikator Kinerja (IK) 3 – Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dihitung berdasarkan dua indikator. Indikator pertama yaitu hasil analisa kesesuaian permohonan pengusahaan terhadap usulan pengusahaan yang masuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (bobot 80%). Indikator kedua yaitu ruang lingkup pelayanan pengusahaan yang terstandardisasi (SOP/ISO/standar pelaksanaan lainnya) (bobot 20%).

Tabel 7. Capaian IK “Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Prigi” Tahun 2025

SK 3		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab							
IK 3		Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan / atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi							
Realisasi Tahun 2020- 2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra PPN Prigi	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	100	100	100	100	100,00%	100	100,00%

Pada tahun 2025, total jumlah usulan pengusahaan yang masuk sebanyak 31 (tiga puluh satu) usulan, dengan 4 (empat) permohonan baru, 4 (empat) permohonan jatuh tempo pemayaran, dan 23 (dua puluh tiga) permohonan perpanjangan. Seluruh usulan pengusahaan yang masuk telah dievaluasi / dianalisa.

Tabel 8. Perhitungan Capaian IK “Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Prigi” Tahun 2025

Indikator Penilaian	Data Dukung		Bobot (%)	% Capaian
Indikator I	Usulan Pengusahaan	Analisa Usulan Pengusahaan	80 %	80 %
	31	31		
Indikator II	02-SP-TKPU/PPN.PRG/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 (SOP Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang Kegiatan Perikanan)		20%	20 %
Persentase Permohonan Pengusahaan				100 %

Tabel 9. Perbandingan Jumlah Usulan Permohonan Pengusahaan di PPN Prigi Tahun 2023 - 2025

No	Jenis Permohonan Pengusahaan	2023		2024		2025	
		Usulan Pengusahaan Masuk	Analisa Usulan Pengusahaan	Usulan Pengusahaan Masuk	Analisa Usulan Pengusahaan	Usulan Pengusahaan Masuk	Analisa Usulan Pengusahaan
1	Baru	26	26	6	6	4	4
2	Perpanjangan	6	6	57	57	23	23
3	Addendum	1	1	-	-	-	-
4	Jatuh Tempo Bayar	-	-	-	-	4	4
	Jumlah	33	33	63	63	31	31

Pada tahun 2025, terdapat permohonan pengusahaan baru sebanyak 4 atas nama KP-RI Karmila 1 (Tanah 286 m², Bangunan 1040 m²) KP-RI Karmila 2 (tanah 195 m², bangunan 1004 m²), PT Berjaya Bintang Segara (tanah 1938m²), CV Primadona South Blue (tanah 1620 m²). Dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah permohonan yang masuk lebih sedikit (50,79%). Pada tahun 2024 mitra usaha area waserda dan pengepakan ikan melakukan perjanjian sewa perseorangan. Sedangkan pada tahun 2025, seluruh tanah dan/atau bangunan tetap termanfaatkan, hanya saja secara kontrak PPN Prigi hanya melakukan perjanjian kontrak dengan KP-RI Karmila yang kemudian dilakukan penerusan sewa ke mitra usaha di area waserda dan pengepakan ikan (43 mitra usaha).

Dibandingkan dengan target Renstra, capaian persentase permohonan pengusahaan yang dievaluasi / dianalisa sebesar 100%. Sedangkan dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), dari persentase mempunyai capaian yang sama yaitu 100%. Akan tetapi, dibandingkan dari jumlah usulan pengusahaan yang dianalisa, jumlah analisa di PPN Prigi sebesar 14,03%, dimana usulan pengusahaan yang masuk ke PPN Palabuhanratu sebanyak 221 usulan. Capaian PPN Palabuhanratu didukung oleh adanya pasar ikan segar yang terdiri dari lebih dari 50% dari total usulan permohonan pengusahaan yang masuk.

Faktor pendukung pencapaian target persentase permohonan yang dianalisa/dievaluasi yaitu terpenuhinya kelengkapan dan kesesuaian berkas yang disampaikan oleh pemohon serta ketersediaan tanah industri yang belum dimanfaatkan. Sedangkan faktor penghambat pencapaian target ini terkait validasi NPWP mitra usaha yang berpengaruh pada proses persetujuan perpanjangan sewa.

Upaya yang akan dilaksanakan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada pengguna jasa (pengguna tanah/bangunan) serta sosialisasi pemanfaatan tanah dan bangunan serta memfasilitasi mitra usaha dalam pelaksanaan koordinasi dengan kantor pajak terdekat.



Gambar 11. Kegiatan Penandatanganan Sewa Tanah & Bangunan serta Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Bangunan di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain pemaparan dan pembahasan calon pengguna tanah di kawasan PPN Prigi; Monitoring dan evaluasi pemanfaatan penggunaan lahan; Monitoring dan evaluasi penggunaan tanah dan bangunan di kawasan PPN Prigi; Penandatanganan kontrak penggunaan bangunan di PPN Prigi; Fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha.

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 10. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Prigi	100%	4.200.000	4.001.356	4.200.000	198.644
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n (AARO_i \times CRO_i) - RARO_i}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ = $\frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				4,73%	
Nilai Efisiensi = $50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right)$ = $50\% + \left(\frac{48,5\%}{20} \times 50\right)$				61,82%	

Pencapaian IK 3 didukung oleh anggaran sebesar Rp 4.200.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi anggaran sebesar Rp 4.001.356,00 atau 95,27% dengan efisiensi 4,73% dan nilai efisiensi 61,82%. Dalam pencapaian IK 3, didukung oleh 3 (tiga) orang SDM yang terdiri dari 1 (satu) orang P3T dan 2 (dua) orang Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana. Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengusahaan (penggunaan tanah dan bangunan), menggunakan aplikasi SIPAUS (Aplikasi pengusahaan) yang berfungsi sebagai digitalisasi arsip terkait penggunaan tanah bangunan, sehingga memudahkan dalam penyimpanan dan pencarian data penggunaan tanah dan bangunan.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian IK 3 yaitu pelabuhan perikanan UPT pusat yang dikelola dan operasional sesuai standar dengan kegiatan pelayanan pengusahaan pelabuhan perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Tingkat kinerja pelabuhan perikanan merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan sesuai SK Ditjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) Administrasi dan sistem informasi; 2) Fasilitas pelabuhan perikanan; 3) Pelayanan umum; serta 4) Investasi dan industri.

Tabel 11. Capaian IK "Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Tahun 2025

SK 3		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab								
IK 4		Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
Realisasi Tahun 2020- 2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
80,58	87,75	92,42	92,81	97,42	84	98,67	117,46%	84	117,46%	

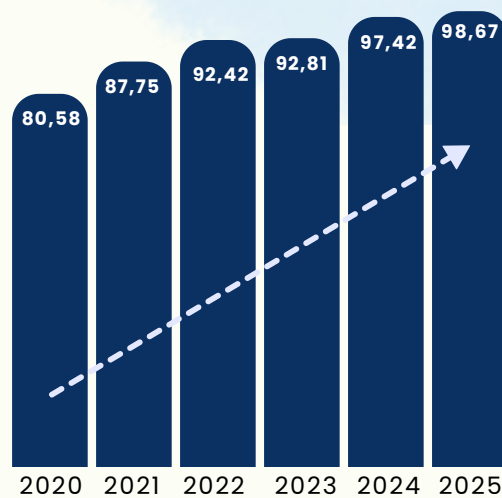
Capaian tingkat kinerja pelabuhan perikanan pada tahun 2025 yaitu 98,67 atau 117,46% dari target tahun 2025. Capaian nilai tingkat kinerja bersifat fluktuatif yang sangat dipengaruhi oleh 27 (dua puluh tujuh) kriteria penilaian. Capaian tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi per bulan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 12. Capaian IK “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” per Bulan Tahun 2025

No	Bulan	Nilai Tingkat Kinerja	Kategori	Keterangan
1	Januari	96,00	Sangat Baik	Nilai frekuensi pengiriman data & STBLKK belum maksimal
2	Februari	93,75	Sangat Baik	Nilai frekuensi pengiriman data & STBLKK belum maksimal, penurunan volume produksi
3	Maret	94,00	Sangat Baik	Volume produksi masih relatif rendah (rata-rata 10,5 ton)
4	April	94,25	Sangat Baik	Nilai frekuensi pengiriman data & STBLKK belum maksimal
5	Mei	95,00	Sangat Baik	Nilai frekuensi pengiriman data & STBLKK belum maksimal
6	Juni	93,00	Sangat Baik	Nilai frekuensi pengiriman data & STBLKK belum maksimal
7	Juli	95,25	Sangat Baik	Peningkatan volume produksi
8	Agustus	99,00	Sangat Baik	Peningkatan volume produksi & STBLKK
9	September	99,00	Sangat Baik	Peningkatan volume produksi & STBLKK
10	Oktober	98,75	Sangat Baik	Penurunan persentase STBLKK
11	November	100,00	Sangat Baik	Peningkatan persentase STBLKK & jumlah investor
12	Desember	97,25	Sangat Baik	Penurunan volume produksi

Capaian evaluasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi menunjukkan kinerja sangat baik dan stabil sepanjang tahun, dengan nilai berkisar 93,00–100,00. Nilai relatif lebih rendah terjadi pada Februari–Juni, sedangkan puncak kinerja tercapai pada Agustus–November, dengan nilai tertinggi 100,00 pada November. Pola ini berkorelasi kuat dengan dinamika oseanografi perairan selatan Jawa Timur. Pada periode Musim Timur (Juni–September), dominasi angin timur memicu *upwelling* di perairan Samudra Hindia selatan Jawa yang meningkatkan suplai nutrisi, produktivitas primer, dan ketersediaan ikan pelagis. Kondisi tersebut berdampak langsung pada meningkatnya aktivitas pendaratan ikan, kelancaran operasional pelabuhan, serta optimalisasi layanan kepelabuhanan, yang tercermin pada nilai kinerja tinggi pada Agustus–Oktober. Sebaliknya, pada Musim Barat (Desember–Februari), kondisi gelombang tinggi dan cuaca kurang bersahabat cenderung membatasi aktivitas penangkapan, meskipun kinerja pelabuhan tetap terjaga pada kategori sangat baik berkat kesiapan manajemen, infrastruktur, dan layanan.

Berdasarkan Tabel 12, kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten. Meskipun bersifat fluktuatif, hal tersebut tidak mempengaruhi keseluruhan kategori kinerja yang tetap berada pada kriteria “Sangat Baik”. Konsistensi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan operasional seperti kondisi cuaca yang kurang mendukung, pengelolaan pelabuhan tetap berjalan secara optimal.



Gambar 12. Perbandingan Capaian Tingkat Kinerja PPN Prigi Tahun 2020-2025

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (tahun 2020 -2024), capaian tingkat kinerja PPN Prigi tahun 2025 merupakan nilai tertinggi. Secara umum, peningkatan ini disebabkan oleh adanya upaya monitoring dan evaluasi secara berkala serta adanya tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan. Peningkatan nilai terjadi pada beberapa kriteria antara lain penyaluran air bersih, es, dan BBM, STBLKK, serta perubahan jumlah investor di pelabuhan perikanan.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra (84), capaian IK 4 sebesar 117,46%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain - PPN Palabuhanratu (99,25), capaian PPN Prigi 99,42%. Hal ini sangat berkaitan erat dengan volume produksi, dimana pada kriteria 15 - produksi perikanan, dapat memperoleh nilai maksimal apabila volume produksi lebih dari 30 ton/hari.

Faktor pendukung pencapaian target tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yaitu :

- Adanya kontribusi dan komitmen dari setiap kelompok kerja yang melakukan tugasnya serta melaporkan dan menginput pelaksanaan kegiatan pada sistem PIPP;
- Adanya monitoring dan evaluasi serta validasi dan supervisi secara berkala terhadap input data yang telah dilaksanakan;
- Adanya tindak lanjut monitoring evaluasi dan supervisi pelaksanaan input data PIPP.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian target ini yaitu tingkat ketelitian operator dalam penginputan data perlu ditingkatkan (*human error*), pemenuhan 27 (dua puluh tujuh) parameter penilaian, keterbatasan anggaran dalam rangka *maintenance* sarana prasarana, jaringan internet kurang cepat, adanya perubahan sistem input data harian/*real time* dan *system error* yang menyebabkan data tidak terekam.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu menyusun jadwal pelaksanaan input data sehingga dapat meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta validasi terdapat input data yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain pelaksanaan operasional PIPP di pelabuhan perikanan, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta validasi terhadap pelaksanaan input data, serta melaksanakan supervisi penerapan sistem informasi dan penguatan keterpaduan pelabuhan perikanan di pelabuhan perikanan UPT daerah yang menjadi pelabuhan binaan PPN Prigi. Adapun tujuan kegiatan tersebut yaitu meningkatkan penerapan sistem informasi dan keterpaduan pelabuhan perikanan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan operator PIPP dalam pelaksanaan input data PIPP sehingga dapat meningkatkan tingkat kinerja pelabuhan perikanan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 13. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK "Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi"

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Tingkat Kinerja PPN Prigi	117,46%	17.703.000	17.618.900	20.794.703	3.175.803
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ = $\frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				17,94%	
Nilai Efisiensi = $50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ = $50\% + \left(\frac{17,94\%}{20} \times 50 \right)$				94,85%	

Pencapaian IK 4 didukung oleh anggaran sebesar Rp 17.703.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi anggaran sebesar Rp 17.618.900,00 atau 99,52% dengan nilai efisiensi 17,94% dan nilai efisiensi 94,85%. Dalam pencapaian IK 4, didukung oleh 12 (dua belas) orang SDM yang terdiri dari operator PIPP dan penanggung jawab kriteria pada masing-masing kelompok kerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Pelabuhan yaitu : Program pelabuhan perikanan UPT pusat dan perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar, melalui kegiatan pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 5 - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Tingkat pelayanan kesyahbandaran merupakan indikator yang menunjukkan pelayanan kesyahbandaran yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen yaitu :

- Jumlah Persetujuan Berlayar yang diterbitkan (bobot 40%) - Dihitung berdasarkan jumlah kapal yang diterbitkan persetujuan berlayarnya dibagi dengan jumlah kapal aktif;
- Jumlah Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%) - Dihitung berdasarkan kapal yang diterbitkan STBLK dibandingkan jumlah kapal aktif;
- Jumlah Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%) - Formula penghitungan = $(100 - (\text{jumlah permintaan verifikasi SHTI yang diterbitkan} : \text{jumlah SHTI yang diterbitkan}) \times 100\%)$.

Tabel 14. Capaian IK "Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" Tahun 2025

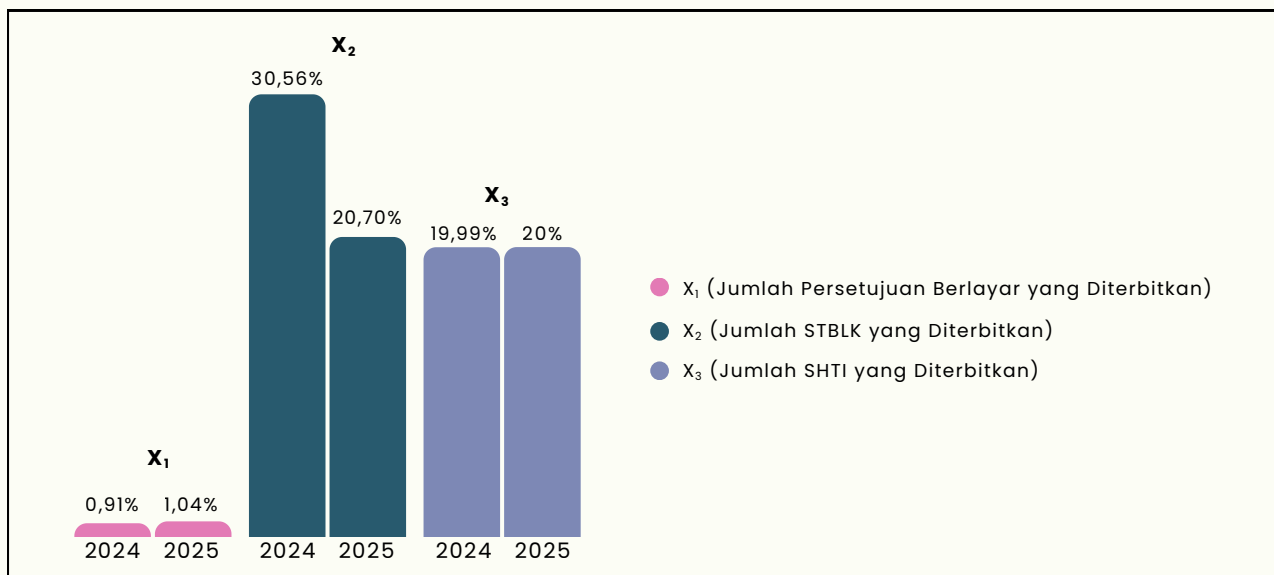
SK 3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab									
IK 5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
Realisasi Tahun 2020- 2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	41,47	51,46	40	41,47	104,35%	46	86,96%	

Capaian tingkat pelayanan kesyahbandaran per indikator penilaian dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 15. Perhitungan Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2025

INDIKATOR		FORMULA PENGHITUNGAN	HASIL PENGHITUNGAN
X_1	Jumlah Persetujuan Berlayar yang Diterbitkan (40%)	$= \frac{\text{jumlah kapal yang diterbitkan persetujuan berlayar}}{\text{jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan}} \times 100 \times 40\%$	$= \frac{6}{230} \times 100 \times 40\% = 1,04\%$
X_2	Jumlah STBLK yang Diterbitkan (40%)	$= \frac{\text{jumlah kapal yang diterbitkan STBLK}}{\text{jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan}} \times 100 \times 40\%$	$= \frac{119}{230} \times 100 \times 40\% = 20,70\%$
X_3	Jumlah SHTI yang Diterbitkan (40%)	$= \left(100 - \left(\frac{\text{jumlah permintaan verifikasi SHTI}}{\text{jumlah SHTI yang diterbitkan}} \right) \right) \times 100 \times 20\%$	$= \left(1 - \frac{0}{2303} \right) \times 100 \times 20\% = 20\%$
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran = $X_1 + X_2 + X_3$			41,47%

Capaian IK tingkat pelayanan kesyahbandaran tahun 2025 sebesar 41,47% yang terdiri dari jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan 1,04% jumlah STBLK yang diterbitkan 20,70% dan jumlah SHTI yang diterbitkan 20%. Secara keseluruhan, capaian ini mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas pelayanan, khususnya pada proses persetujuan berlayar dan sinkronasi data kapal aktif agar tingkat pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dapat lebih optimal dan mendukung kelancaran operasional pelabuhan perikanan.



Gambar 13. Perbandingan Persentase Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Tahun 2024 & 2025

Berdasarkan perbandingan capaian tingkat pelayanan kesyahbandaran antara tahun 2024 dan 2025, terlihat adanya penurunan kinerja pada tahun 2025. Pada tahun 2024, tingkat pelayanan kesyahbandaran mencapai 51,46%, sedangkan pada tahun 2025 menurun menjadi 41,47%, atau terjadi penurunan sebesar 9,99 poin persentase. Penurunan ini terutama disebabkan oleh melemahnya kinerja indikator STBLK (X_2) yang pada tahun 2024 memberikan kontribusi 30,56%, namun pada tahun 2025 hanya mencapai 20,70%, seiring menurunnya proporsi kapal yang diterbitkan STBLK terhadap jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan. Penurunan ipenerbitan STBLKK dikarenakan terdapat kapal perikanan yang aktif tidak melaporkan kedatangan. Sedangkan indikator penerbitan PB dan SHTI terbilang stabil. Terjadi sedikit peningkatan terhadap penerbitan PB untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT.

Dibandingkan dengan target Renstra, capaian tingkat pelayanan kesyahbandaran tahun 2025 sebesar 86,96%. Sedangkan dibandingkan dengan capaian capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 106,80%, dimana capaian IK 5 PPN Palabuhanratu 38,83%.

Adapun faktor pendukung tercapainya IK 5 yaitu bertambahnya kapal berukuran diatas 30 GT dan kapal berukuran s.d. 5 GT secara bertahap dilakukan penerbitan PB untuk mendukung capaian kinerja serta peningkatan SDM untuk kompetensi kesyahbandaran. Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian indikator ini yaitu faktor cuaca dan musim penangkapan ikan yang tidak bisa diprediksi, kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kedatangan kapal. Selain itu, pemenuhan dokumen kapal juga menjadi faktor penghambat yang paling berpengaruh terhadap tingkat pelayanan kesyahbandaran.

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat tersebut, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan penerbitan PB secara bertahap bagi kapal berukuran s.d. 5 GT, di atas 5 GT dan di atas 30 GT guna mendukung pencapaian kinerja kesyahbandaran, serta diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM melalui pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, akan dilakukan penguatan monitoring dan evaluasi terhadap kapal yang beroperasi agar tetap memenuhi ketentuan keselamatan dan kelengkapan dokumen. Untuk mengatasi faktor penghambat, dilakukan peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada pemilik dan nahkoda kapal terkait kewajiban lapor kedatangan serta pemenuhan dokumen kapal, disertai pengawasan yang lebih intensif. Faktor cuaca dan musim penangkapan ikan yang tidak dapat diprediksi akan diantisipasi dengan penyesuaian pola pelayanan dan fleksibilitas pelaksanaan kegiatan, sehingga pelayanan kesyahbandaran tetap berjalan secara optimal.



Gambar 14. Kegiatan Cek Teknis dan Nautis Kapal serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerai Kapal Perikanan dan Perizinan Berusaha

Upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain : pembinaan izin usaha perikanan, gerai dokumen kapal perikanan perikanan dan perizinan berusaha, pengecekan teknis nautis kapal, pendampingan pengukuran kapal perikanan oleh Kementerian Perhubungan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 16. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Prigi	104,35%	24.138.000	23.956.895	25.188.003	1.231.108
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ = $\frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				5,10 %	
Nilai Efisiensi = $50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right)$ = $50\% + \left(\frac{2,56\%}{20} \times 50\right)$				62,75%	

Pencapaian IK 5 didukung oleh anggaran sebesar Rp 24.138.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi anggaran sebesar Rp 23.956.895,00 atau 99,25% dengan efisiensi 5,10% dan nilai efisiensi 62,75%. Dalam pencapaian IK 5, didukung oleh 12 (dua belas) orang SDM, yang terdiri dari 1 (satu) orang Syahbandar, 8 (delapan) orang petugas penerbitan SPB dan STBL, serta 3 (tiga) orang petugas penerbitan SHTI. Dalam pelaksanaan penerbitan SHTI, PPN Prigi memiliki inovasi “KIRIM SHTI” untuk peningkatan efektifitas waktu, biaya, dan tenaga dalam pengajuan SHTI, dimana pengguna jasa tidak perlu datang ke PPN Prigi. Permohonan penerbitan SHTI dikirimkan melalui email dan produk SHTI dikirim melalui jasa pengiriman dengan biaya pengiriman dibayar pemohon (*Cash in Delivery / COD*).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran yaitu : Program pelabuhan perikanan UPT pusat dan perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar, melalui kegiatan penyiapan dan pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, pengelolaan dan operasional sesuai standar, serta laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi.

Indikator Kinerja (IK) 6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya. Indikator kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Prigi” dihitung berdasarkan persentase pengembangan fasilitas eksisting (ha) dibandingkan dengan luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan (ha).

Tabel 17. Capaian IK “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2025

SK 3		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab								
IK 6		Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
Realisasi Tahun 2020- 2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	74,58	74,66	70	75,53	107,90%	70	107,90%	

Capaian IK 6 tahun 2025 sebesar 75,53% atau 107,90% dari target tahun 2025. Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari pengembangan fasilitas dibandingkan dengan luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2003. Secara umum, pengembangan dan peningkatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi telah mencapai target yang ditentukan. Tanah/ daratan merupakan fasilitas pokok yang salah satunya dimanfaatkan untuk fasilitas industri. Pada tahun 2024, total pemanfaatan tanah industri seluas 31.435 m² . Sedangkan pada tahun 2025 terdapat penambahan pemanfaatan tanah industri dengan luas 3.558 m² yang terdiri dari PT. Berjaya Bintang Segara seluas dan CV. Primadona South Blue seluas 1.620 m², keduanya bergerak di bidang *cold storage*. Sehingga total pemanfaatan tanah industri sampai tahun 2025 seluas 34.993 m².

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, dimana target akhir yaitu 70%, capaian persentase pengendalian pengembangan fasilitas di PPN Prigi tahun 2025 sebesar 107,90%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 91,75%, dimana capaian IK 6 PPN Palabuhanratu 82,32%.

Faktor pendukung pencapaian target IK 6 yaitu adanya peningkatan penggunaan tanah industri. Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja ini yaitu efisiensi anggaran, beberapa fasilitas belum aktif dan mendukung pencapaian tersebut.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian persentase pengendalian pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan antara lain : 1) Mengajukan usulan pengembangan pelabuhan; 2) Reviu masterplan. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu monitoring pembangunan pemanfaatan sewa lahan.

Pada tahun 2025, tidak terdapat dukungan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja ini. Dalam pencapaian IK 6, didukung oleh 4 (empat) orang SDM, yang terdiri dari 3 (tiga orang) Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana serta 1 (satu) orang AP3T. Sedangkan program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian IK 2 yaitu pelabuhan perikanan UPT pusat dan perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar.

Indikator Kinerja (IK) 7 - Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus 1) bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.

Penilaian pengendalian lingkungan pelabuhan perikanan berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang diupdate berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore pelabuhan. Indikator hasil meliputi kebersihan pelabuhan, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3, dan kepatuhan regulasi.

Tabel 18. Capaian IK “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2025

SK 3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab									
IK 7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
Realisasi Tahun 2020– 2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	91,27	96,39	30,10	88,64	294,49%	30,10	294,49%	

Capaian IK 7 tahun 2025 sebesar 88,64 atau 294,49% dari target tahun 2025. Capaian nilai pengendalian lingkungan PPN Prigi memiliki predikat “Sangat Baik”, hal ini disebabkan seluruh indikator program *mandatory* dan program *voluntary* tata kelola pengendalian lingkungan terpenuhi dan terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Berdasarkan hasil penilaian program pengendalian lingkungan PPN Prigi dapat disimpulkan bahwa nilai pengendalian lingkungan PPN Prigi triwulan tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 (nilai 96,39). Pada bulan Oktober 2025 terdapat selisih antara nilai pada aplikasi dengan nilai koreksi pusat. Program *voluntary* pada aplikasi nilai 15 yang menunjukkan bahwa PPN Prigi telah menyelesaikan program *voluntary* secara maksimal, sedangkan nilai koreksi pusat hanya sebesar 3,3. Kondisi tersebut tidak memberikan kesempatan bagi UPT untuk mengajukan sanggahan kepada pusat, sehingga berdampak pada penurunan nilai penilaian pada bulan Oktober 2025. Oleh karena itu, untuk tahun 2026 diusulkan agar penerbitan hasil penilaian dilakukan setiap bulan dan UPT diberikan waktu untuk mengajukan sanggahan apabila terdapat perbedaan terhadap nilai koreksi pusat sebelum surat resmi diterbitkan.

Jika dibandingkan dengan target Renstra (30,10) capaian nilai pengendalian lingkungan sebesar 294,49%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 97,75%, dimana capaian IK 7 PPN Palabuhanratu 90,68.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain:

- Adanya kontribusi dan komitmen dari setiap petugas yang melakukan tugasnya dan melaporkan serta mengumpulkan *evidence* pelaksanaan kegiatan di WAG Selaraskan PPN Prigi;
- Data dukung yang dibutuhkan dalam pelaporan setiap program *mandatory* dan *voluntary* di SELARASKAN sudah terpenuhi sesuai dengan periode pelaksanaan masing-masing program;
- Adanya monitoring dan evaluasi serta validasi secara berkala terhadap input data yang telah dilaksanakan.

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu kendala penginputan data pada bulan November dan Desember, aplikasi selaraskan sedang dilakukan migrasi, *source code* dan *database* aplikasi sudah diberikan ke pada Pusdatin.

Upaya yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian lingkungan. Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain : Bimtek pengelolaan lingkungan dan pelabuhan sehat, pelaksanaan dan pembinaan K5 di pelabuhan perikanan, gerakan bersih laut (bulan cinta laut), penimbangan sampah laut, dan kegiatan lainnya.



Gambar 15. Kegiatan Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM).

Tabel 19. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Prigi	294,49%	77.198.000	76.917.000	227.336.569	150.419.569
$\text{Efisiensi RO Satker} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				194,85%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{48,5\%}{20} \times 50 \right)$				537,12%	

Pencapaian IK 7 didukung oleh anggaran sebesar Rp 77.198.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi anggaran sebesar Rp 76.917.000,00 atau 99,64 % dengan efisiensi 194,85% dan nilai efisiensi 537,12%. Dalam pencapaian IK 7, didukung oleh 8 (delapan) orang SDM berdasarkan Surat Tugas Tim Pengelola Aplikasi Selaraskan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Nilai Pengendalian Lingkungan yaitu : Program pelabuhan perikanan UPT pusat dan perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar melalui kegiatan K5 di pelabuhan perikanan, gerakan cinta laut dalam rangka mendukung pengendalian lingkungan, bimtek pengelolaan lingkungan dan pelabuhan sehat, serta *surveillance* ISO 14001.

3.2.4. Sasaran Kegiatan (SK) 4 - Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator Kinerja (IK) pada SK 4 yaitu Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan dan Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 8 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Indikator kinerja “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (Sertifikat Kelaikan Kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Tabel 20. Capaian IK “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” Tahun 2025

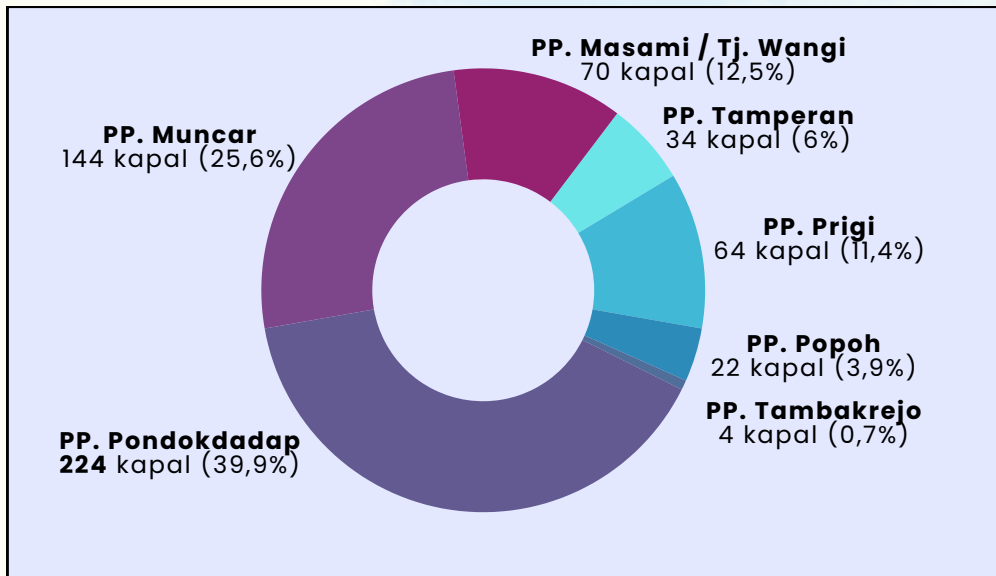
SK 3		Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di PPN Prigi								
IK 7		Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan								
Realisasi Tahun 2020- 2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
-	-	148	337	486	502	562	111,95%	502	111,95%	

Tabel 21. Rekapitulasi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

No	Bulan	Jumlah Penerbitan Dokumen				Jumlah
		2023	2024	2025		
				Reguler	Pembaruan	
1	Januari	33	10	2	-	45
2	Februari	40	6	-	1	47
3	Maret	59	7	2	1	69
4	April	32	-	13	4	49
5	Mei	51	2	11	3	67
6	Juni	26	14	9	-	49
7	Juli	40	16	7	-	61
8	Agustus	2	16	2	-	20
9	September	25	29	1	-	55
10	Oktober	19	14	5	3	41
11	November	4	17	-	2	23
12	Desember	6	18	8	2	34
Jumlah		337	149	60	16	562

Realisasi capaian kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) kapal atau 111,95% dari target tahun 2025. Capaian ini merupakan akumulasi dari capaian tahun 2023 (337 kapal), capaian tahun 2024 (149 kapal), dan capaian tahun 2025 (76 kapal). Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja ini menunjukkan tren menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan mekanisme penerbitan SKKP, dimana pada tahun 2023 menggunakan mekanisme surat edaran dan reguler, pada tahun 2024 hanya menggunakan mekanisme reguler. Sedangkan pada tahun 2025, selain hanya menggunakan mekanisme reguler, juga terdapat efisiensi anggaran.

PPN Prigi melayani penerbitan SKPP di pelabuhan binaan (UPT PPP Tamperan, UPT PPP Popoh, IPPP Tambakrejo, UPT PPP Pondokdadap, UPT PPP Muncar, dan Pelabuhan Masami/ Tanjungwangi). Penerbitan SKKP di masing-masing pelabuhan dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



Gambar 16. Persentase Penerbitan SKKP di PP. Prigi dan Pelabuhan Binaan

Jika dibandingkan dengan target Rensta (502 kapal), capaian kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan sebesar 111,95%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 184,87%, dimana capaian IK 8 PPN Palabuhanratu 304 (tiga ratus empat) kapal.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu syahbandar di beberapa UPTD binaan telah mengikuti diklat petugas kelaikan sehingga proses pemeriksaan kelaikan menjadi lebih cepat. Sedangkan faktor penghambat / kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu tidak ada anggaran menyebabkan mobilitas dalam rangka pemeriksaan kelaikan di UPTD binaan menjadi terbatas.

Upaya yang akan dan telah dilaksanakan yaitu melaksanakan kegiatan pemeriksaan kelaikan kapal, serta melaksanakan sosialisasi secara perorangan kelaikan kapal perikanan kepada pemilik kapal perikanan.



Gambar 17. Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan

Pada tahun 2025, tidak terdapat dukungan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja ini. Dalam pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 9 (sembilan) orang SDM yang terdiri atas 7 (tujuh) orang petugas kelaikan kapal, 1 (satu) orang verifikator, dan Kepala Pelabuhan.

Indikator Kinerja (IK) 9 - Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Indikator Kinerja (IK) "Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan" merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B. 2541/MEN-KP/XII/2024. Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan.

Tabel 22. Capaian IK "Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan" Tahun 2025

SK 4		Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di PPN Prigi							
IK 9		Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Persen)							
Realisasi Tahun 2020- 2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra PPN Prigi	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	0,26	0,33	126,92%	0,26	126,92%

Berdasarkan hasil pengumpulan dan verifikasi dokumen Persetujuan Berlayar (PB) tahun 2025, capaian indikator kinerja tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sebesar 0,33% atau 126,92% dari target yang ditentukan.

Capaian tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berada pada range nilai $> 0,25$ s.d. $< 0,50$ kategori "Cukup". Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan, seluruh dokumen SPB yang diterbitkan telah memenuhi persyaratan penerbitan minimal. Akan tetapi, sebagian besar kapal yang beroperasi belum memiliki Perjanjian Kerja Laut (PKL) serta BPJS.

Persyaratan penerbitan SPB berdasarkan minimal syarat penerbitan meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pas Kapal, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP), Sertifikasi (SKK, BST, ANKAPIN), Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLK), dan *Crew List*. Sedangkan berdasarkan Surat Edaran, terdapat tambahan bukti pemenuhan PNBPN, persyaratan dokumen Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT), serta BPJS ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Laut (PKL) untuk awak kapal.

Tabel 23. Perhitungan Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan Tahun 2025

No	Jenis Kepatuhan	PB Terbit	Verifikasi	Nilai Kepatuhan
1	s.d. 5 GT	4	Check list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan PB (e)	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah PB s.d. 5 GT}}$ $= \frac{(4 \times 0,25) + (0 \times 0,50) + (0 \times 0,75) + (0 \times 1,00)}{4}$ $= \frac{1}{4} = 0,25$
2	>5 s.d. 30 GT	19	Check list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan PB (e)	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah PB s.d. 5 GT}}$ $= \frac{(19 \times 0,25) + (0 \times 0,50) + (0 \times 0,75) + (0 \times 1,00)}{19}$ $= \frac{4,75}{19} = 0,25$
3	>30 S.D. 100 GT	4	Check list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan PB sesuai SE (e)	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah PB s.d. 5 GT}}$ $= \frac{(0 \times 0,25) + (4 \times 0,50) + (0 \times 0,75) + (0 \times 1,00)}{4}$ $= \frac{2}{4} = 0,50$
Total Nilai Akhir				$= \frac{\text{s.d. 5 GT} + > 5 \text{ s.d. 30 GT} + > 30 \text{ s.d. 100 GT}}{3 \text{ (Jumlah range kepatuhan di pelabuhan)}}$ $= \frac{0,25 + 0,25 + 0,50}{3}$ $= \frac{1}{3} = 0,33$
Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan				0,33

Indikator kinerja tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan merupakan indikator baru pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan target Renstra, capaian tahun 2025 sebesar 126,92%. Sedangkan dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 73,33%, dimana capaian PPN Palabuhanratu sebesar 0,45%.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah kapal sampai dengan 5 GT telah diterbitkan Persetujuan Berlayar (PB). Selain itu, telah dilakukan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pembuatan PKL dan kepesertaan BPJS. Pelaku usaha juga menunjukkan sikap kooperatif dan saat ini berada pada tahap perencanaan pembangunan awak kapal ke depannya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah awak kapal masih banyak yang belum memiliki BPJS ketenagakerjaan.

Berdasarkan kendala yang dihadapi, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melanjutkan penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) bagi kapal berukuran sampai dengan 5 GT serta meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pembuatan PKL dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi awak kapal secara bertahap dan berkelanjutan. Selain itu, akan dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha pada tahap perencanaan pemenuhan PKL dan BPJS bagi awak kapal guna mendorong kepatuhan ke depannya. Untuk mengatasi faktor penghambat, pembinaan dan sosialisasi yang lebih intensif akan diberikan kepada pemilik kapal dan awak kapal mengenai pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga diharapkan jumlah awak kapal yang belum terdaftar BPJS dapat terus diminimalkan.



Gambar 18. Kegiatan Identifikasi Kapal Perikanan dan Kapal Non Perikanan serta Pembinaan Izin Usaha Perikanan

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja ini antara lain: Pembinaan izin usaha perikanan, pengecekan teknis dan nautis kapal perikanan, fasilitasi penandatanganan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan cek kesehatan awak kapal perikanan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerai dokumen kapal perikanan dan perizinan berusaha.

Pada tahun 2025, tidak terdapat dukungan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja ini. Dalam pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 5 (lima) orang SDM yang terdiri dari petugas teknis, tenaga pendukung, dan staf pelaksana lapangan. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja tingkat pemenuhan persyaratan berkerja awak kapal perikanan yaitu fasilitasi dan pembinaan masyarakat melalui kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi awak kapal perikanan / nelayan.

3.2.5. Sasaran Kegiatan (SK) 5 - Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator Kinerja (IK) pada SK 4 yaitu: Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Indikator Kinerja (IK) 10 - Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator kinerja ini merupakan penilaian pembangunan ZI menuju WBK yang mencakup 6 (enam) area pengungkit dan 2 (dua) area komponen hasil yang mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Tabel 24. Capaian IK “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
IK 10		Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)								
Realisasi Tahun 2020- 2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
87	78,86	85,15	91,37	91,84	75,5	81,83	108,38%	75,5	108,38%	

Nilai PM Pembangunan ZI yang dicapai pada tahun 2025 adalah sebesar 81,83 atau telah melampaui target sebesar 108,38% dari target tahun 2025. Nilai capaian PM Pembangunan ZI ini merupakan jumlah nilai dari komponen pengungkit dan komponen hasil yang terdiri dari :

- Komponen Pengungkit (60%) yang dibagi menjadi Pemenuhan (30%) dan Reform (30%), yang terdiri dari Manajemen Perubahan (5%), Penataan Tatalaksana (5%), Penataan Sistem Manajemen SDM (15%),

Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%), Penguatan Pengawasan (15%);
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)

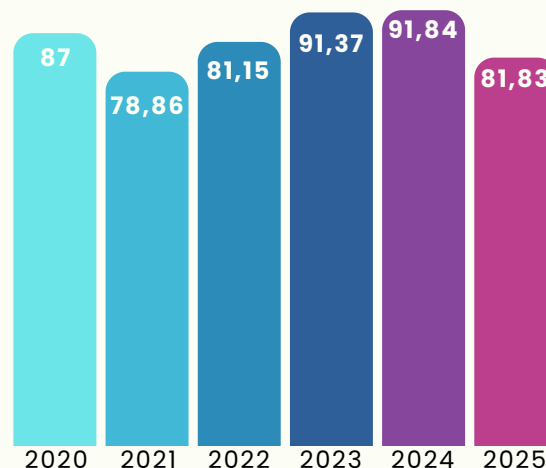
- Komponen Hasil (40%) yang terdiri dari Birokrasi yang bersih dan akuntabel (20%) serta pelayanan publik yang prima (20%).

Berdasarkan hasil penilaian mandiri, diperoleh gambaran capaian kinerja pembangunan ZI yang menunjukkan progres pelaksanaan reformasi birokrasi serta komitmen unit kerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Hasil penilaian mandiri menunjukkan bahwa capaian nilai PM pembangunan ZI PPN Prigi telah memenuhi sebagian besar indikator ZI. Hasil penilaian mandiri selanjutnya menjadi dasar dalam melakukan evaluasi internal, penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan, serta penguatan area yang masih memerlukan peningkatan.

Tabel 25. Capaian IK “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” per Komponen

PENILAIAN				BOBOT	NILAI	%
A.	PENGUNGKIT			60,00	48,22	
	I	PEMENUHAN		30,00	36,39	87,64%
		1	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	3,77	94,16%
		2	PENATAAN TATA LAKSANA	3,50	2,93	83,76%
		3	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN	5,00	4,50	89,93%
		4	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	5,00	5,00	100,00%
		5	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	5,60	74,61%
		6	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	4,50	90,03%
	II	REFORM		30,00	21,93	73,10%
		1	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	2,67	66,67%
		2	PENATAAN TATA LAKSANA	3,50	2,00	57,14%
		3	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN	5,00	2,25	45,00%
		4	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	5,00	5,00	100,00%
		5	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	6,25	83,33%
		6	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	3,76	75,25%
	TOTAL PENGUNGKIT				48,22	80,37%
B.	HASIL			40,00	33,61	
	I	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22,50	18,47	82,08%
		a.	Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi)	17,50	15,97	91,35%
		b.	Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	2,50	50,00%
	II	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17,50	15,14	86,50%
		a.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50	15,14	86,50%
	TOTAL HASIL				33,61	84,02%
NILAI PM PEMBANGUNAN ZI PPN PRIGI					81,83	

Dibandingkan capaian tahun 2024, capaian nilai PM ZI tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 10,01 atau 6,42%. Penurunan terjadi pada komponen pemenuhan (area penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, dan penguatan pengawasan) serta komponen hasil (penurunan capaian kinerja daripada capaian kinerja sebelumnya). Berdasarkan capaian nilai PM ZI WBK PPN Prigi tahun 2020–2025, terlihat pola kinerja yang secara umum menunjukkan perbaikan dengan dinamika fluktuatif. Pada tahun 2020 nilai PM ZI WBK tercatat sebesar 87, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 78,86. Selanjutnya, kinerja kembali meningkat pada tahun 2022 dengan capaian 81,15 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing mencapai 91,37 dan 91,84 yang mencerminkan konsistensi perbaikan tata kelola, kualitas layanan, serta penguatan budaya integritas. Pada tahun 2025, nilai PM pembangunan ZI berada pada angka 81,83 yang meskipun mengalami penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya, tetap menunjukkan capaian kinerja yang relatif baik. Secara keseluruhan, periode 2020–2025 menggambarkan komitmen PPN Prigi dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dengan tren peningkatan yang signifikan hingga 2024 dan capaian yang tetap terjaga pada tahun 2025.



Gambar 18. Perbandingan Capaian Nilai PM Pembangunan ZI Tahun 2020–2025

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, dimana target akhir tahun yaitu 75,5 capaian nilai PM Pembangunan ZI telah melebihi target yaitu sebesar 108,38%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2025 telah melakukan pemenuhan dokumen-dokumen pemenuhan berdasarkan ketentuan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian nilai PM Pembangunan ZI PPN Prigi sebesar 97,20% dimana capaian PPN Palabuhanratu yaitu 84,19. PPN Palabuhanratu memiliki nilai pemenuhan yang lebih baik, khususnya pada bagian reform. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain seluruh program agen perubahan telah memberikan perubahan yang konkret pada instansi serta implementasi SPBE yang telah terintegrasi dan mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien.

Adanya keterlibatan dalam menyusun dokumen kelengkapan pembangunan ZI secara tepat waktu menjadi faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini. Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaiannya antara lain: Program agen perubahan belum memiliki dampak yang luas utamanya kepada stakeholder; Adanya perubahan kebijakan Eselon I terkait hukuman disiplin; dan Capaian Kinerja PPN Prigi Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Upaya yang akan dilaksanakan yaitu menyusun program perubahan yang berdampak luas ke *stakeholder*, sosialisasi kebijakan hukuman disiplin ke seluruh pegawai, serta menyusun rencana aksi kinerja tahun 2026. Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain melaksanakan pemantauan pembangunan ZI; melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kelengkapan dokumen WBK.



Gambar 20. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI WBK serta Kegiatan Program Kerja Agen Perubahan

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” dapat sebagai berikut.

Tabel 26. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Nilai PM Pembangunan ZI PPN Prigi	108,38%	1.000.000	963.200	1.083.841	120.641
Efisiensi RO Sater = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ = $\frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				12,06%	
Nilai Efisiensi = $50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right)$ = $50\% + \left(\frac{12,06\%}{20} \times 50\right)$				80,16%	

Pencapaian IK 10 didukung oleh anggaran sebesar Rp 1.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 963.200,00 atau 96,32% dengan nilai efisiensi 15,06% dan nilai efisiensi 80,16%. Dalam pencapaian IK 10, didukung oleh 42 (empat puluh dua) orang SDM berdasarkan Surat Tugas B.836/PPN.PRG/KP.440/VII/2025 tentang Tim Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Lingkup PPN Prigi Tahun 2025. Dokumen ZI WBK dikumpulkan melalui *google drive*, sehingga lebih memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen serta memudahkan koordinasi tim.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yaitu : yaitu program Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal melalui kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada audit, reuiu, dan evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV 2024 s.d. triwulan III tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Formula penghitungan yaitu persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diberikan.

Tabel 27. Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2025

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
IK 11		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
Realisasi Tahun 2020– 2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	100	100	85	100	125%	85	125%	

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada tahun 2025 yaitu 100% atau 125% dari target yang ditentukan. Pada tahun 2025, di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tidak dilakukan pengawasan / evaluasi oleh Inspektorat Jenderal.

Faktor pendukung capaian kinerja ini yaitu adanya tindak lanjut temuan dan/atau saran pada laporan hasil pengawasan secara tepat waktu serta koordinasi dengan Itjen terkait penyelesaian permasalahan. Secara umum, tidak ada kendala dalam pencapaian target kinerja ini.

Pada tahun 2025, tidak terdapat dukungan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja ini. Kegiatan koordinasi dan konsultasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dilakukan secara *online* dan pemenuhan dokumen diunggah pada *google drive* sehingga lebih efektif dan efisien, baik dari segi sumber daya manusia maupun waktu penyelesaiannya.

Indikator Kinerja (IK) 12 - Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 (empat) aspek penilaian didalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Tabel 28. Komponen Penilaian Mandiri SAKIP

No	Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
		Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
2	Pengukur Kinerja	6	9	15	30
3	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
4	Evaluasi Kinerja	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		20	30	50	100

Tabel 29. Capaian IK “Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2025

SK 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
IK 12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
Realisasi Tahun 2020– 2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
87,16	87,84	80,85	83,10	84	88	88,60	100,68%	88	100,68%	

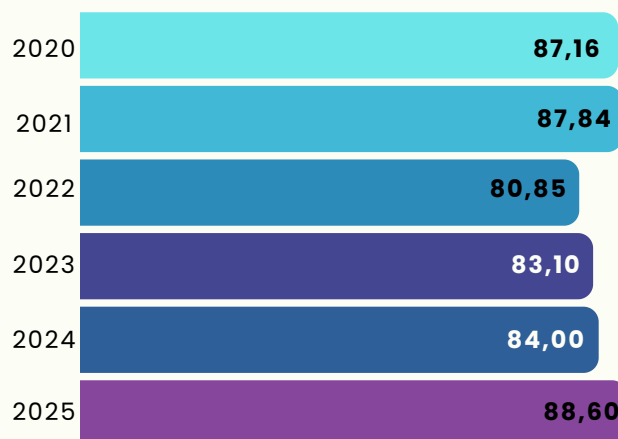
Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 19 September 2025. Penilaian mandiri dimaksud bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan konsisten dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP secara konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri, secara umum pelaksanaan SAKIP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi menunjukkan adanya peningkatan keterkaitan antara komponen penilaian SAKIP. Capaian Penilaian Mandiri (PM) SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2025 yaitu 88,60 atau 100,68% dari target tahun 2025.

Tabel 30. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2025

No	Komponan	Nilai Maksimal	Nilai PM SAKIP 2025	Predikat
1	Perencanaan Kinerja	30	26,70	
2	Pengukur Kinerja	30	27,60	
3	Pelaporan Kinerja	15	13,80	
4	Evaluasi Kinerja	25	20,50	
Total Nilai		100	88,60	A (Memuaskan)

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 4,6 atau 5,48%. Hal ini juga didukung oleh adanya inovasi dalam pengelolaan SAKIP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.



Gambar 21. Perbandingan Capaian Nilai PM SAKIP PPN Prigi Tahun 2020 – 2025

Capaian nilai PM SAKIP PPN Prigi pada periode 2020–2025 menunjukkan dinamika kinerja yang dipengaruhi oleh perubahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) mulai tahun 2022. Pada tahun 2020 dan 2021, nilai PM SAKIP relatif stabil dan berada pada kategori sangat baik, masing-masing sebesar 87,16 dan 87,84. Memasuki tahun 2022, terjadi penurunan nilai menjadi 80,85 yang tidak semata-mata mencerminkan penurunan kinerja organisasi, melainkan erat kaitannya dengan perubahan LKE yang mengadopsi indikator, bobot penilaian, serta standar eviden yang lebih komprehensif dan ketat dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun 2023 dan 2024, nilai PM SAKIP kembali mengalami peningkatan menjadi 83,10 dan 84,00, yang mengindikasikan adanya proses adaptasi PPN Prigi terhadap kebijakan evaluasi baru, khususnya dalam penguatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan dan evaluasi internal. Puncaknya, pada tahun 2025 nilai PM SAKIP meningkat signifikan menjadi 88,60, melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa PPN Prigi mampu mengoptimalkan implementasi SAKIP secara lebih efektif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan peningkatan kualitas tata kelola kinerja organisasi, dengan perubahan LKE berperan sebagai faktor pendorong perbaikan sistem dan konsistensi penerapan manajemen kinerja di PPN Prigi.

Dibandingkan dengan target Renstra, capaian PM SAKIP 2025 sebesar 100,68%. Sedangkan dibandingkan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu) sebesar 89,50 capaian PM SAKIP PPN Prigi sebesar 98,99%. Perbedaan capaian ini terletak pada komponen perencanaan kinerja dengan selisih 0,90.

Faktor pendukung utama dalam penilaian SAKIP adalah komitmen pimpinan terhadap penerapan manajemen kinerja. Dukungan pimpinan berperan penting dalam memastikan keterkaitan yang jelas antara perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan realisasi program/kegiatan. Selain itu, keberadaan dokumen perencanaan yang berkualitas yang selaras dengan tujuan organisasi dan indikator kinerja yang terukur, relevan, serta berorientasi hasil (*outcome*) juga menjadi penentu tingginya nilai SAKIP. Faktor pendukung lainnya adalah sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang berjalan secara berkala, didukung oleh ketersediaan data kinerja yang andal, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri sebagai eviden penilaian. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya aparatur yang menangani perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja dan pelaporan SAKIP turut memperkuat konsistensi dan kualitas implementasi SAKIP.

Adapun faktor penghambat dalam penilaian SAKIP umumnya bersumber dari lemahnya pemahaman dan konsistensi penerapan manajemen kinerja di seluruh unit kerja. Hal ini sering tercermin pada indikator kinerja yang masih berorientasi *output*, belum sepenuhnya menggambarkan *outcome* atau manfaat bagi pemangku kepentingan. Perubahan kebijakan penilaian, termasuk penyesuaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), juga dapat menjadi hambatan apabila tidak diikuti dengan proses sosialisasi dan pendampingan yang memadai. Selain itu, keterbatasan kualitas dan keterpaduan data kinerja, lemahnya mekanisme evaluasi internal, serta rendahnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi turut memengaruhi rendahnya capaian nilai. Faktor lain yang kerap menghambat adalah keterbatasan kapasitas SDM, tingginya beban administrasi, dan belum optimalnya integrasi SAKIP dengan sistem penganggaran berbasis kinerja.

Secara keseluruhan, keberhasilan penilaian SAKIP sangat ditentukan oleh keseimbangan antara komitmen pimpinan, kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, serta efektivitas evaluasi dan tindak lanjut. Sebaliknya, ketidaksiapan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan lemahnya budaya kinerja akan menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan nilai SAKIP.



Gambar 22. Kegiatan Pengelolaan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengumpulan, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara periodik melalui kegiatan GASIK (Giat Evaluasi Kinerja) yang dilaksanakan per bulan dan monev capaian kinerja yang dilaksanakan per triwulan. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain pengembangan inovasi yang mendukung dalam pencapaian kinerja.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumberdaya pendukung meliputi 2 (dua) hal, yaitu anggaran dan sumber daya manusia. Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 31. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja “Nilai PM SAKIP PPN Prigi” Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Nilai PM SAKIP PPN Prigi	100,68 %	16.637.000	16.539.868	16.750.434	210.566
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ = $\frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				1,27%	
Nilai Efisiensi = $50\% + \left(\frac{80}{20} \times 50\right)$ = $50\% + \left(\frac{-}{20} \times 50\right)$				53,16%	

Pencapaian IK 12 didukung oleh anggaran sebesar Rp 16.637.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 16.539.868,00 atau 99,42% dengan nilai efisiensi 1,27% dan nilai efisiensi 56,16%. Dalam pencapaian IK 12, didukung oleh 17 (tujuh belas) orang SDM berdasarkan Surat Tugas B.823/PPN.PRG/KP.440/VI/2025 tentang Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2025. Untuk memudahkan kegiatan pengumpulan dan pengukuran dan pelaporan kinerja, pengumpulan data capaian dan analisisnya dilakukan menggunakan *google spreadsheet* yang terintegrasi dengan *dashboard* Capaian Kinerja PPN Prigi (Si Cakep) yang mendukung efektifitas dan efisiensi dalam pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Sedangkan pemenuhan dokumen diunggah pada *google drive*, sehingga lebih efektif dan efisien, baik dari segi sumber daya manusia maupun waktu penyelesaiannya.

Indikator Kinerja (IK) 13 - Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya (Permen PAN dan RB No.38 Tahun 2018). Terdapat penyesuaian / perubahan cara perhitungan IP ASN sesuai dengan surat BKN 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 15 September 2023 tentang pengukuran IP-ASN. Perubahan formula perhitungan sebagai berikut :

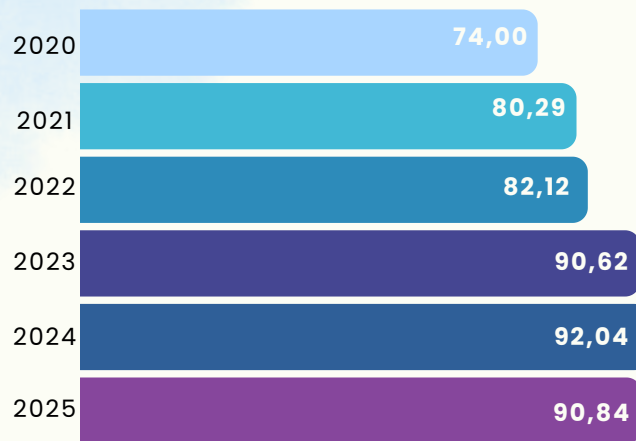
- Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
- Diklat 20JP dihitung secara proposional;
- Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja;
- Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.

Tabel 32. Capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2025

SK 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
IK 13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
Realisasi Tahun 2020– 2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
74	80,29	82,12	90,62	92,04	87	90,84	104,41%	87	104,41%	

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi telah berhasil mencapai target indeks profesional ASN sebesar 90,84 atau 104,41% dari target tahun 2025. Jika ditinjau dari kategori hasil capaian indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2025 berada pada kategori “Tinggi”.

Pada semester II tahun 2025, PPN Prigi mendapatkan nilai sebesar 90,84 dengan kategori Tinggi. Hal ini dapat terjadi sebab terbitnya BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 pada tanggal 20 Juni 2024. Terbitnya surat tersebut membuat dasar perhitungan IP ASN menjadi berubah khususnya terkait masuknya PPPK dalam akumulasi perhitungan IP ASN. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah pegawai yg terhitung dalam capaian IP ASN. Pada tahun 2025 semester II PPN Prigi memiliki total pegawai sebanyak 62 orang. Sedangkan pada semester II tahun 2025 total pegawai yg terhitung pada akumulasi IP ASN sebanyak 61 orang. Pengurangan jumlah pegawai disebabkan karena adanya 1 org pegawai pensiun dan 1 orang pegawai meninggal dunia. Namun hal ini tidak memiliki dampak yg terlalu signifikan mengingat pada semester II tahun 2025 PPN Prigi mendapatkan tambahan pegawai sebanyak 3 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 (1 orang), S1 (2 orang). Jika dibandingkan dengan tahun 2024 capaian IP ASN tahun 2025 tergolong menurun. Hal tersebut terjadi mengingat adanya perubahan peraturan dan cara perhitungan IP ASN sesuai dengan terbitnya peraturan baru.



Gambar 23. Perbandingan Capaian IP ASN PPN Prigi Tahun 2020 – 2025

Berdasarkan grafik perbandingan capaian IP ASN PPN Prigi tahun 2020–2025, terlihat adanya tren peningkatan yang berkelanjutan hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, IP ASN berada pada angka 74,00, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 80,29 dan kembali naik pada tahun 2022 sebesar 82,12, yang menunjukkan perbaikan bertahap dalam kinerja dan kompetensi ASN. Peningkatan paling menonjol terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 90,62, yang berlanjut pada tahun 2024 menjadi 92,04 sebagai nilai tertinggi selama periode pengamatan. Meskipun pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan menjadi 90,84, capaian tersebut tetap berada pada kategori sangat baik dan jauh lebih tinggi dibandingkan awal periode, sehingga secara keseluruhan mencerminkan keberhasilan PPN Prigi dalam meningkatkan kualitas kinerja ASN secara signifikan dan relatif stabil dalam jangka menengah.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian IP ASN tahun 2025 mengalami penurunan akibat perubahan regulasi dan metode perhitungan IP ASN seiring terbitnya ketentuan baru. Meskipun jumlah pegawai yang masuk dalam perhitungan IP ASN tahun 2025 meningkat, perubahan formula perhitungan menyebabkan nilai capaian tahun 2025 lebih rendah, selisih 1,20 poin dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024 tercatat 51 pegawai, terdiri atas 29 orang kategori Sangat Tinggi dan 22 orang kategori Tinggi, sedangkan pada tahun 2025 terdapat 29 orang kategori Sangat Tinggi, 30 orang kategori Tinggi, dan 2 orang kategori Sedang.

Penurunan tersebut berkaitan dengan terbitnya Peraturan BKN Nomor 410/B-M.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yang mengubah mekanisme akumulasi perhitungan IP ASN dan berdampak pada meningkatnya jumlah pegawai yang diperhitungkan. Pada tahun 2025, PPN Prigi memiliki 61 pegawai dengan latar belakang pendidikan yang lebih beragam, yaitu 1 orang S2, 33 orang S1, 9 orang DIII, dan 18 orang SLTA, yang tetap mendukung pencapaian target IP ASN meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, PPN Prigi memperoleh nilai IP ASN 90,84 dengan kategori Tinggi, selisih 0,86 poin lebih rendah dibandingkan IP ASN PPN Palabuhanratu yang mencapai 91,70 dengan kategori Sangat Tinggi. Meskipun jumlah pegawai PPN Prigi lebih banyak (61 orang) dibandingkan PPN Pelabuhan Ratu (54 orang), perbedaan capaian IP ASN relatif tidak signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh komposisi kategori penilaian, di mana PPN Prigi memiliki 29 pegawai kategori Sangat Tinggi, 30 kategori Tinggi, dan 2 kategori Sedang, sedangkan PPN Palabuhanratu memiliki 29 kategori Sangat Tinggi, 19 kategori Tinggi, dan 6 kategori Sedang.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain:

- Mutasi pegawai yang terjadi selama tahun 2025 meningkatkan kualifikasi pegawai di lingkup PPN Prigi. Tahun 2025 tercatat 1 orang pegawai jenjang S1 mutasi keluar a.n Fauzan Yusuf, dan 1 orang atas nama Andhika Putra pendidikan D3. Digantikan dengan mutasi masuk 1 orang jenjang pendidikan S2 a.n Abdul Iman, 2 orang S1 a.n Tri Aspriadi Noviyanto dan Iskandar;
- Pencantuman gelar, tahun 2025 sebanyak 3 orang pegawai telah berhasil meningkatkan kualifikasi pendidikan dari SMA ke S1 a.n Wiji Sri Yuhani, Prawoto dan Hartono.

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya perubahan mekanisme perhitungan yang membuat proses input dan evaluasi capaian IP ASN menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini, rencana tindak lanjut yaitu penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi capaian IP ASN yang baru agar sesuai dengan mekanisme input data yang baru. Tahun 2026 input data tidak lagi mampu dilaksanakan oleh operator. Setiap pegawai wajib memiliki kemampuan dan kedisiplinan dalam melakukan update data mandiri melalui aplikasi my ASN.

Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain melakukan pembinaan melalui apel pagi dan dialog kerja lainnya, monev capaian masing-masing pegawai, peningkatan kompetensi pegawai melalui tugas belajar, dan pencantuman gelar pegawai dari BKN (peningkatan kualifikasi pendidikan).

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 33. Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Indeks Profesionalitas ASN PPN Prigi	104,41 %	8.955.026.000	8.864.682.461	9.350.282.320	485.599.859
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ = $\frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				5,42%	
Nilai Efisiensi = $50\% + \left(\frac{ERO}{20} \times 50\right)$ = $50\% + \left(\frac{5,42\%}{20} \times 50\right)$				63,56%	

Pencapaian IK 13 didukung oleh anggaran sebesar Rp 8.955.026.000,00 dan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.864.682.461,00 atau 98,99% dengan efisiensi 5,42% dan nilai efisiensi 63,56%. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 61 (enam puluh satu) orang ASN. Selain itu, didukung oleh 2 (dua) orang Analis Kepegawaian yang bertugas melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan, monitoring dan evaluasi, input data capaian pengembangan kompetensi pada aplikasi SIASN serta evaluasi tingkat kedisiplinan pada masing - masing pegawai. Sedangkan program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program dukungan manajemen internal – layanan perkantoran melalui pembayaran gaji dan tunjangan.

Indikator Kinerja (IK) 14 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dapat mempresentasikan kualitas perencanaan PBJ di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Nilai pada indikator ini diperoleh didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan pada SiRUP dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan

pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Tabel 34. Capaian IK “Persentase RUP PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2025

SK 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
IK 14	Persentase RUP PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
Realisasi Tahun 2020- 2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	-	76	100	131,58%	78	131,58%	

Pada triwulan IV 2025, persentase RUP terumumkan sebesar 100% artinya tidak terdapat selisih antara besaran pagu yang harus diumumkan sesuai dengan kertas kerja klarifikasi dengan pagu yang terumumkan pada SiRUP.

Tabel 35. Hasil Penghitungan Persentase Rencana Umum Pengadaan Terumumkan di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Triwulan IV 2025

Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP Terumumkan	
Σ RUP Penyedia	Σ RUP Swakelola	Σ RUP	Program 1	Program 2	Program 3	Total Pengadaan	Selisih Pagu Terumumkan & Pagu Pengadaan	%
3.096.535.000	-	3.096.535.000		143.086.000	2.953.449.000	3.096.535.000	-	100

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan upaya optimalisasi kinerja Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan tindak lanjut berupa identifikasi belanja pengadaan (PBJ) yang terdampak efisiensi belanja dan dapat dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada SiRUP.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi telah melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SiRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga, diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SiRUP yang melebihi 100%.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian persentase RUP PBJ tahun 2025 sebesar 131,58%. Sedangkan dibandingkan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), menunjukkan persentase capaian yang sama yaitu 100%.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu adanya upaya konsultasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga RUP yang terumumkan dalam SiRUP sesuai dengan RUP pada kertas kerja klarifikasi. Secara umum, tidak terdapat kendala dalam pencapaian target indikator kinerja ini.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK "Persentase RUP PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 36. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK "Persentase RUP PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di PPN Prigi"

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Persentase RUP BPJ yang Diumumkan pada SiRUP di PPN Prigi	131,58 %	332.022.000	331.733.184	436.871.053	105.137.869
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ = $\frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				31,67%	
Nilai Efisiensi = $50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right)$ = $50\% + \left(\frac{31,67\%}{20} \times 50\right)$				129,16%	

Pencapaian IK 14 didukung oleh anggaran sebesar Rp 332.022.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 331.733.184,00 atau 99,91% dengan efisiensi 31,67% dan nilai efisiensi 129,16%. SDM yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat Pembuat Komitmen (PKK). Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta layanan perkantoran.

Indikator Kinerja (IK) 15 - Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut :

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 10%)
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 balik ke penggunaan barang dan pengelolaan barang (bobot 25%)
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (reevaluasi aset) (bobot 20%)
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (Bobot 25%)
- Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%)

Tabel 37. Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2025

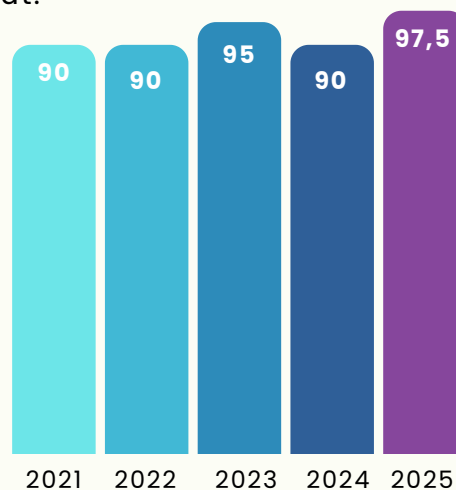
SK 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
IK 15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
Realisasi Tahun 2020- 2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
-	90	90	95	90	81	97,5	120,37%	81	120,37%	

Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Prigi tahun 2025 sebesar 97,5% atau 120,37% dari target tahun 2025. Capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan berdasarkan Lembar Kerja Pengukuran Persentase Pengelolaan BMN yang mencakup:

- Dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN);
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST;
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian;
- Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu.

Terkait dengan capaian tersebut, hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian indikator kinerja tersebut pada tahun berikutnya yaitu peningkatan pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” dapat dilihat pada Tabel berikut.



Gambar 24. Perbandingan Capaian Tingkat Pengelolaan BMN Tahun 2021 – 2025

Berdasarkan grafik perbandingan capaian tingkat pengelolaan BMN tahun 2021–2025, terlihat bahwa kinerja pengelolaan BMN relatif stabil pada tingkat tinggi sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2021 dan 2022, capaian berada pada angka 90, menunjukkan konsistensi pemenuhan indikator pengelolaan BMN. Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 95, yang mengindikasikan adanya perbaikan signifikan, baik dari aspek penatausahaan, pemanfaatan, maupun pengendalian BMN. Namun, pada tahun 2024, terdapat penurunan capaian diakibatkan adanya penurunan mekanisme pengukuran capaian kinerja (menggunakan capaian unit Eselon I). Selanjutnya, pada tahun 2025, mekanisme pengukuran kembali

seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, capaian meningkat menjadi 97,5, yang menunjukkan keberhasilan penguatan tata kelola BMN secara berkelanjutan, termasuk peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, kualitas administrasi aset, serta efektivitas pengawasan internal. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan komitmen organisasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan BMN dari tahun ke tahun.

Dibandingkan dengan target Renstra, capaian IK 15 tahun 2025 sebesar 120,37%. Sedangkan dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu) yang memiliki capaian 81, capaian PPN Prigi sebesar 120,37%.

Faktor pendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya optimalisasi kinerja dan evaluasi terhadap BMN yang lebih baik. Sedangkan faktor penghambat/kendala yang dihadapi yaitu tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL masih perlu ditingkatkan.

Terkait dengan pencapaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian indikator kinerja dimaksud pada tahun berikutnya yaitu peningkatan pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL masih perlu ditingkatkan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi" dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 38. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi"

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Prigi	120,37 %	3.124.537.000	3.106.440.049	3.761.016.759	654.576.710
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ = $\frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				20,95%	
Nilai Efisiensi = $50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right)$ = $50\% + \left(\frac{20,95\%}{20} \times 50\right)$				102,37%	

Pencapaian IK 15 didukung oleh anggaran sebesar Rp 3.124.537.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.106.440.049,00 atau 99,42% dengan efisiensi 20,95% dan nilai efisiensi 102,37%. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 3 (tiga) orang pejabat Pengelola BMN.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program layanan perkantoran - melalui kegiatan pemeliharaan alat pengolah data, perawatan kendaraan dinas, langganan daya dan jasa, jasa pos / giro, operasional perkantoran dan pimpinan, serta operasional perkantoran.

Indikator Kinerja (IK) 16 - Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

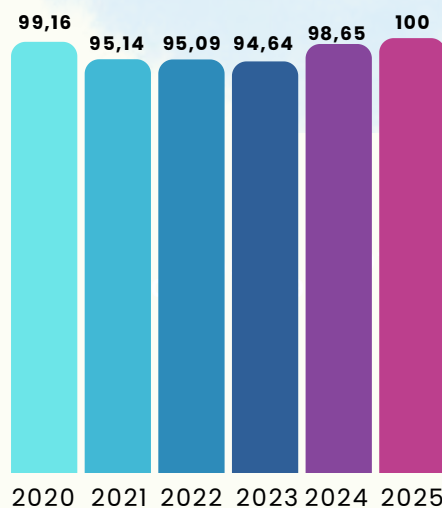
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara / Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Peraturan DJPB PER-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Halaman 3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retus SP2D; 12) Pagu Minus; 13) Dispensasi.

Tabel 39. Capaian IK “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2025

SK 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
IK 16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
Realisasi Tahun 2020- 2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
99,16	95,14	95,09	94,64	98,65	92	100	108,69%	81	108,69%	

Capaian nilai IKPA pada tahun 2025 sebesar 100 atau 108,69% dari target yang ditetapkan. Seluruh aspek penilaian, mencakup kualitas perencanaan anggaran (revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA), kualitas pelaksanaan anggaran (penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TIP), serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran (capaian output) memperoleh nilai maksimal.



Gambar 25. Perbandingan Capaian Nilai IKPA PPN Prigi Tahun 2020 - 2025

Berdasarkan grafik perbandingan capaian nilai IKPA PPN Prigi tahun 2020–2025, dapat dianalisis bahwa kinerja pelaksanaan anggaran secara umum berada pada kategori sangat baik di seluruh periode pengamatan, dengan nilai selalu di atas 94. Pada tahun 2020, nilai IKPA tercatat sebesar 99,16, menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang optimal. Namun, pada periode 2021–2023 terjadi tren penurunan bertahap, masing-masing menjadi 95,14 (2021), 95,09 (2022), dan mencapai titik terendah pada 94,64 di tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam konsistensi pelaksanaan anggaran, seperti ketepatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun kepatuhan administrasi terhadap indikator IKPA.

Memasuki tahun 2024, nilai IKPA kembali meningkat signifikan menjadi 98,65, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian. Puncaknya terjadi pada tahun 2025 dengan capaian nilai sempurna 100, yang menandakan bahwa seluruh indikator IKPA dapat dipenuhi secara optimal. Secara komparatif, capaian tahun 2025 merupakan yang tertinggi sepanjang periode 2020–2025, sekaligus menunjukkan keberhasilan PPN Prigi dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas pengelolaan pelaksanaan anggaran. Tren ini menegaskan adanya komitmen peningkatan tata kelola keuangan yang semakin kuat dari waktu ke waktu.

Dibandingkan dengan target Renstra, capaian nilai IKPA 108,69%. Sedangkan dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 105,82% dimana capaian PPN Palabuhanratu sebesar 94,5.

Secara umum, tidak terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja Nilai IKPA. Sedangkan Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini pada tahun 2025 sebagai berikut:

- Perencanaan anggaran yang matang - Penyusunan RKA-K/L atau DIPA yang realistis dan terukur, berdasarkan kebutuhan riil setiap unit kerja dan proyeksi kinerja.
- Pelaksanaan tepat waktu - Pengajuan revisi DIPA, SP2D, dan penatausahaan anggaran dilakukan sesuai jadwal, sehingga tidak menimbulkan tunggakan atau deviasi.
- Sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan - Adanya dashboard atau aplikasi pelaporan realisasi anggaran harian/mingguan, serta rapat evaluasi berkala untuk mendeteksi dan menindaklanjuti penyimpangan sejak dini.
- Koordinasi antar unit kerja - Sinergi yang baik antara unit perencanaan, keuangan, teknis pelaksana, dan tim pengawasan (inspektorat/internal audit) untuk memastikan kesesuaian antara program, anggaran, dan laporan.
- Kepatuhan terhadap regulasi - Penerapan prosedur SP2D, LPJ dan pelaporan keuangan sesuai peraturan (PMK, Perpres, SE DJPb), sehingga tidak ada temuan administrasi yang merugikan.

Upaya yang akan dilaksanakan yaitu melakukan pemantauan dan rapat evaluasi realisasi anggaran secara berkala untuk mendeteksi dan menindaklanjuti penyimpangan sejak dini dan melaksanakan akselerasi pelaksanaan pertanggungjawaban tepat waktu. Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu evaluasi berkelanjutan terhadap serapan anggaran dan melaksanakan koordinasi antar unit kerja.

Pada tahun 2025, tidak terdapat dukungan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja ini. SDM yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari 2 (dua) orang Pengelola Keuangan, 2 (dua) orang Pranata Keuangan APBN, serta 1 (satu) orang Analis Pengelola Keuangan APBN dan 1 orang Pengelola BMN. Pemanfaatan SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi) dan aplikasi *e-Budgeting / e-Monitoring* yang memudahkan input data, validasi, dan pelaporan *real time*.

Indikator Kinerja (IK) 17 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara / Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian RO, penggunaan SBK, dan efisiensi sesuai bobot masing-masing indikator. Variabel penilaian terdiri dari efektivitas (75) terdiri dari capaian RO serta efisiensi (25) terdiri dari penggunaan SBK (10) dan efisiensi SBK (15).

Tabel 40. Capaian IK “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2025

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
IK 17		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
Realisasi Tahun 2020- 2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	90	71,5	94,93	132,78%	94,93	132,78%	

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 90 pada tahun 2024 menjadi 94,93 pada tahun 2025. Kenaikan sebesar 4,93 poin ini mencerminkan perbaikan kualitas perencanaan anggaran yang semakin efektif, baik dari aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, ketepatan penetapan target kegiatan, maupun konsistensi dalam penganggaran. Capaian tahun 2025 yang mendekati nilai maksimal mengindikasikan bahwa proses perencanaan anggaran di PPN Prigi telah berjalan lebih matang, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi, serta menunjukkan peningkatan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan komponen Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPN Prigi antara tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya peningkatan yang nyata pada aspek efisiensi. Pada kedua tahun tersebut, capaian Rincian Output (RO) dan penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) sama-sama mencapai nilai maksimal 100, yang menandakan konsistensi dalam ketepatan perencanaan *output* serta kepatuhan terhadap penerapan SBK. Perbedaan utama terlihat pada efisiensi SBK, yang meningkat signifikan dari 33,35 pada tahun 2024 menjadi 66,2 pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan dalam pengendalian dan optimalisasi biaya pada tahap perencanaan anggaran, sehingga perencanaan tahun 2025 tidak hanya memenuhi aspek kesesuaian dan kepatuhan, tetapi juga lebih efisien dibandingkan tahun sebelumnya.

Dibandingkan dengan target Renstra, capaian NKPA tahun 2025 yaitu 132,78%. Sedangkan dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian NKPA PPN Prigi sebesar 97,87% dimana capaian PPN Palabuhanratu sebesar 97. Perbandingan capaian kinerja perencanaan anggaran antara PPN Prigi dan PPN Palabuhanratu menunjukkan kesamaan pada aspek kepatuhan dan ketepatan perencanaan, namun berbeda pada tingkat efisiensi. Kedua pelabuhan sama-sama mencapai nilai maksimal 100 pada capaian Rincian Output (RO) dan penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK), yang mengindikasikan bahwa perencanaan output telah sesuai target serta penerapan SBK telah dilakukan secara konsisten. Perbedaan terlihat pada efisiensi SBK, di mana PPN Prigi mencatat nilai 66,2, sedangkan PPN Palabuhanratu mencapai 80. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PPN Prigi telah mengalami perbaikan efisiensi dibandingkan periode sebelumnya, PPN Palabuhanratu masih lebih optimal dalam merencanakan biaya relatif terhadap output yang dihasilkan. Dengan demikian, PPN Prigi masih memiliki ruang untuk meningkatkan efisiensi perencanaan anggaran agar dapat mendekati praktik terbaik yang telah dicapai oleh PPN Palabuhanratu.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain: Peningkatan variabel efektivitas satker melalui peningkatan Capaian Rincian Output; Peningkatan variabel efisiensi berdasarkan perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks Standar Biaya Keluaran (SBK).

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu : Realisasi volume tidak sesuai dengan target volume (nilai capaian RO pada variabel efektivitas); Penggunaan SBK tidak terdapat pada setiap RO (nilai penggunaan SBK pada variabel efisiensi); Ketidakesesuaian antara indeks SBK RO dengan PMK SBK (nilai penggunaan SBK pada variabel efisiensi) kualitas perencanaan anggaran; Nilai indeks RA SBK lebih besar daripada indeks SBK RO sesuai dengan PMK SBK (nilai efisiensi SBK pada variabel efisiensi).

Upaya yang akan dilaksanakan yaitu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan meningkatkan efektivitas (peningkatan CRO) dan efisiensi (kesesuaian antara indeks realisasi anggaran dengan indeks SBK), serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 41. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Prigi	132,78 %	10.272.000	10.271.606	13.638.055	3.366.449
$\text{Efisiensi RO Satker} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				32,77%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{ng}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{131,93\%}{20} \times 50 \right)$				131,93%	

Pencapaian IK 17 didukung oleh anggaran sebesar Rp 10.272.000,00 dan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.271.606,00 atau 99,97% dengan efisiensi 32,7% dan nilai efisiensi 131,93%. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Pencapaian IK ini didukung oleh 2 (dua) orang Analis Pengelola Keuangan APBN. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program layanan pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

Indikator Kinerja (IK) 18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/ Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/ Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Tabel 42. Capaian IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2025

SK 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
IK 18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
Realisasi Tahun 2020- 2025					Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
83	85	86,37	90,11	93,22	88,50	93,54	105,70%	88,50	105,70%	

Capaian indikator kinerja SKM tahun 2024 yaitu 93,22 dengan kategori “Sangat Baik” atau 105,57% dari target tahun 2024 dimana target tahun 2024 sebesar 88,30. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2024, tetapi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selalu dilakukan secara periodik. Tujuan pelaksanaan SKM yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, serta mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Tabel 43. Detail Nilai SKM per Unsur Tahun 2025

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per Unsur	3,92	3,83	3,67	3,58	3,75	3,62	3,71	3,62	3,62
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	93,54 (A atau Sangat Baik)								



Gambar 26. Detail Nilai SKM PPN Prigi per Unsur Tahun 2025

Berdasarkan perbandingan SKM tahun 2024 dan 2025, secara umum kinerja pelayanan masih berada pada kategori A (Sangat Baik) pada kedua tahun tersebut, dengan nilai SKM unit layanan meningkat tipis dari 93,22 pada tahun 2024 menjadi 93,54 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan agregat kepuasan pengguna layanan, meskipun dinamika capaian antar unsur menunjukkan variasi.

Berdasarkan hasil analisa indeks kepuasan masyarakat untuk unsur yang tertinggi adalah:

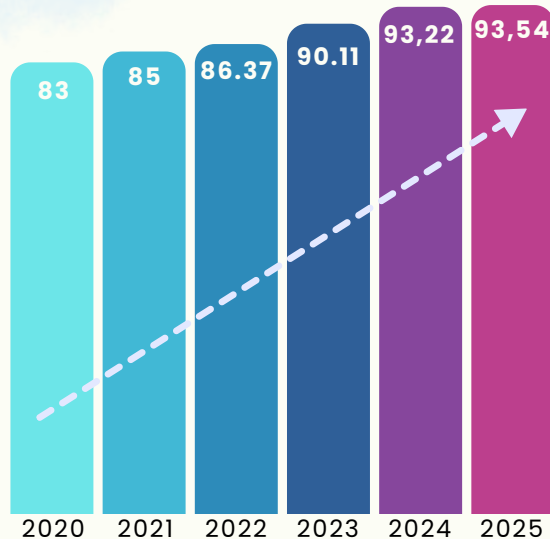
- Kesesuaian Persyaratan - PPN Prigi telah menetapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat semua persyaratan dalam pelaksanaan pelayanan sehingga memudahkan pengguna jasa dalam memahami pelaksanaan pelayanan. Untuk pelayanan dengan nilai tertinggi unsur kemudahan prosedur adalah pelayanan penggunaan gedung beku, pelayanan penerbitan persetujuan berlayar dan pelayanan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan.
- Kemudahan Prosedur - Untuk pelayanan dengan nilai tertinggi unsur kemudahan prosedur adalah pelayanan penggunaan gedung beku, pelayanan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan dan pelayanan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan.
- Kesesuaian Produk - Dalam melaksanakan pelayanan, pengguna jasa wajib mendapatkan produk layanan sesuai dengan layanan yang diinginkan. Kesesuaian produk mendapatkan nilai tertinggi ketiga dalam penilaian survey kepuasan masyarakat triwulan IV tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengguna jasa telah mendapatkan produk sesuai dengan jenis layanan yang diinginkan. Nilai kesesuaian produk tertinggi didapatkan oleh pelayanan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, disusul pelayanan penerbitan persetujuan berlayar dan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal.

Sedangkan unsur layanan dengan nilai terendah berdasarkan hasil analisa indeks survey kepuasan masyarakat adalah:

- **Kesesuaian Biaya** - Unsur kesesuaian biaya memperoleh nilai terendah, terutama pada pelayanan tambat dan/atau labuh kapal perikanan, diikuti oleh pelayanan sertifikasi hasil tangkapan ikan serta penggunaan tanah dan/atau bangunan. Rendahnya nilai ini diduga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi terkait tarif pelayanan.
- **Layanan Konsultasi** - Layanan konsultasi termasuk unsur dengan nilai terendah pada Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025. Pelayanan dengan nilai terendah meliputi layanan air, disusul listrik serta tambat dan/atau labuh kapal perikanan dan nonperikanan. Kondisi ini diduga akibat minimnya sosialisasi terhadap sarana layanan konsultasi yang tersedia di PPN Prigi.
- **Sarana Prasarana** - Unsur sarana prasarana dengan nilai terendah terdapat pada pelayanan penerbitan listrik, diikuti pelayanan air serta penggunaan tanah dan/atau bangunan. Rendahnya penilaian ini diduga disebabkan oleh sering terjadinya kerusakan pada fasilitas terkait.

Pada unsur U1 (Persyaratan Layanan) terjadi peningkatan nilai dari 3,87 menjadi 3,92, yang menunjukkan persyaratan layanan semakin jelas dan mudah dipenuhi. U2 (Kemudahan Prosedur) relatif stabil meskipun sedikit menurun dari 3,85 menjadi 3,83. Penurunan lebih signifikan terjadi pada U3 (Waktu Penyelesaian) dan U4 (Kesesuaian Biaya), masing-masing dari 3,81 menjadi 3,67 dan dari 3,81 menjadi 3,58, yang mengindikasikan menurunnya kepuasan terhadap ketepatan waktu dan kesesuaian biaya. U5 (Kesesuaian Produk), U6 (Kecepatan Respon), dan U7 (Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas) juga mengalami penurunan, sementara U8 (Kualitas Isi/Sarana) dan U9 (Layanan Konsultasi) turun dari 3,79 menjadi 3,62.

Secara keseluruhan, meskipun nilai SKM unit layanan tahun 2025 mengalami peningkatan secara agregat dan tetap berada pada kategori sangat baik, penurunan pada sebagian besar unsur pelayanan menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap aspek waktu penyelesaian, kesesuaian biaya, kecepatan respon, kualitas sarana, serta layanan konsultasi. Hal ini penting agar peningkatan kinerja tidak hanya tercermin pada nilai total, tetapi juga merata pada seluruh unsur pelayanan yang dirasakan langsung oleh pengguna jasa.



Gambar 27. Perbandingan Capaian Nilai SKM Tahun 2020–2025

Berdasarkan grafik capaian nilai SKM PPN Prigi tahun 2020–2025, terlihat tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Nilai SKM meningkat dari 83 pada tahun 2020 menjadi 85 pada 2021, lalu kembali naik menjadi 86,37 pada 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 90,11, yang menandai masuknya kategori kinerja pelayanan sangat baik. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan nilai 93,22 dan mencapai puncaknya pada tahun 2025 sebesar 93,54. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelayanan publik di PPN Prigi, baik dari sisi proses pelayanan maupun kepuasan pengguna layanan.

Dibandingkan dengan target Renstra, capaian nilai SKM tahun 2025 sebesar 105,7%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu) dengan capaian nilai SKM 98,59, capaian nilai SKM PPN Prigi sebesar 94,88%. Perbandingan unsur menunjukkan bahwa PPN Palabuhanratu unggul hampir di seluruh indikator, khususnya pada U1 (Persyaratan Layanan), U3 (Waktu Penyelesaian), U4 (Kesesuaian Biaya), dan U5 (Kesesuaian Produk) yang nilainya konsisten mendekati atau di atas 3,93. Sementara itu, PPN Prigi memiliki capaian yang relatif baik dan merata di seluruh unsur, namun masih berada di bawah Palabuhanratu terutama pada aspek waktu penyelesaian dan kesesuaian produk layanan. PPN Prigi dan PPN Palabuhanratu berada pada kategori pelayanan sangat baik, namun PPN Palabuhanratu menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi dan kinerja pelayanan yang lebih optimal dibandingkan PPN Prigi, sehingga dapat menjadi rujukan praktik baik (*best practice*) dalam peningkatan kualitas layanan di PPN Prigi.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain adanya perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas pelayanan masyarakat, adanya tindak lanjut monev SKM serta masukan dan/atau saran dari pengguna jasa. Sedangkan faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu petugas pelayanan dinilai kurang cepat dalam memberikan respon serta terdapat beberapa sarana dan prasarana yang rusak.

Berkaitan dengan hasil SKM triwulan IV tahun 2025, maka akan direncanakan perbaikan atas unsur pelayanan dengan nilai terendah. Adapun rencana tindak lanjut untuk perbaikan pelayanan sebagai berikut:

- Sosialisasi terkait kesesuaian biaya (tarif pelayanan);
- Menambahkan sarana prasarana layanan konsultasi yang mudah diakses oleh stakeholder;
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap sarana prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan dan juga perbaikan sarana prasarana.

Upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain monitoring dan evaluasi hasil survei kepuasan masyarakat serta menindaklanjuti saran dan/atau masukan serta rekomendasi tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan, serta melaksanakan bimbingan teknis pelayanan prima.



Gambar 28. Kegiatan Reviu Standar Pelayanan dan Forum Konsultasi Publik

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 44. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat PPN Prigi	105,70 %	1.550.000	1.465.000	1.638.271	173.271
$\text{Efisiensi RO Satker} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				11,18%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{Ro}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{11,18\%}{20} \times 50 \right)$				77,95%	

Pencapaian IK 18 didukung oleh anggaran sebesar Rp 1.550.000,00 dan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.465.000,00 atau 94,52% dengan efisiensi 5,96% dan nilai efisiensi 64,90%. Berdasarkan Surat Tugas Nomor B.144/PPN.PRG/KP.440/I/2025 tentang Petugas Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, SDM yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Penggunaan aplikasi SISUSAN meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan SKM, baik dari segi waktu maupun SDM. Penggunaan aplikasi SISUSAN meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan SKM, baik dari segi SDM maupun waktu.

Program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator kinerja ini yaitu program pelabuhan perikanan UPT pusat dan perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar melalui kegiatan forum konsultasi publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi T.A. 2025.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Nomor T.A. 2025 dengan nomor: SP DIPA 032.03.2.427670/2025 tanggal 02 Desember 2024 adalah Rp 13.527.573.000,00 (Pagu sebelum blokir). Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang upaya efisiensi anggaran pada APBN tahun 2025, berpengaruh terhadap jumlah anggaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang berubah menjadi Rp 13.167.885.000,00 (Pagu setelah blokir). Anggaran tersebut dibagi dalam 3 (tiga) kegiatan utama sebagai berikut:

- Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
- Pengelolaan Sumber Daya Ikan
- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Capaian pelaksanaan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 13.054.504.368,00 atau sebesar 99,14% dari total Pagu Anggaran T.A. 2025.

Tabel 45. *Penyerapan Anggaran berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Utama Tahun 2025*

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	320.776.000	318.432.000	99,27%
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	1.142.000	1.142.000	100%
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	12.845.967.000	12.734.930.368	99,14%
	Jumlah	13.167.885.000	13.054.504.368	99,14%

Target anggaran yang ditetapkan, direncanakan untuk menghasilkan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 46. *Penyerapan Anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan Tahun 2025*

No	Sasaran Kegiatan	Target Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Th.2025 (Rp)	NPSS	% Realisasi Anggaran
1	Nilai PNBP sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Prigi	603.602.000	599.914.849	120,00%	99,61%
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Prigi Meningkat	-	-	101,95%	-
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab	123.239.000	122.494.151	110,41%	99,40%
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di PPN Prigi	-	-	116,78%	-
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Prigi	12.441.044.000	12.332.095.368	112,16%	99,12%
Jumlah / Persentase		13.167.885.000	13.054.504.368		99,14%



BAB.IV PENUTUP



BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah direncanakan. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur.

Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama tahun 2025. Terhadap capaian Indikator Kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi, serta membandingkan terhadap target tahunan dan capaian Indikator Kinerja pada tahun sebelumnya, target akhir Renstra, dan capaian satker lain yang memiliki karakteristik hampir sama sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2025 secara keseluruhan dinyatakan tercapai.

Pada tahun 2025, memiliki kategori "ISTIMEWA", ditandai dengan Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 112,26%. Berdasarkan target pada rencana aksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2025, terdapat 18 (delapan belas) Indikator Kinerja yang mendukung 5 (lima) Sasaran Kegiatan memiliki capaian >100%.

Dalam pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi terdapat beberapa kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kedatangan kapal dan pemenuhan dokumen kapal;
- Capaian nilai pengendalian lingkungan bersifat fluktuatif serta memerlukan upaya monitoring dan evaluasi berkala;
- Awak kapal masih banyak yang belum memiliki BPJS ketenagakerjaan serta Perjanjian Kerja Laut (PKL);
- Program kerja agen perubahan belum berdampak luas ke *stakeholder*;
- Nilai IKPA sangat dipengaruhi oleh pencapaian masing-masing indikator penilaian yang membutuhkan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- Kurangnya sosialisasi terkait tarif pelayanan.

Hal ini menunjukkan perlu upaya yang lebih besar untuk dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan pada periode selanjutnya. Upaya-upaya dimaksud disampaikan pada langkah-langkah perbaikan (rekomendasi tindak lanjut).

4.2. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya

Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (triwulan III tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti pada periode triwulan IV tahun 2025 yaitu :

- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja serta menganalisis kendala yang dihadapi serta mengajukan permohonan revisi target indikator kinerja Volume Produksi Perikanan Tangkap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian nilai pengendalian lingkungan;
- Melaksanakan pemantauan dan rapat evaluasi untuk mendeteksi dan menindaklanjuti penyimpangan sejak dini;
- Melaksanakan pembinaan melalui apel pagi untuk meningkatkan pengetahuan petugas pelayanan publik.

4.3.Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2024, rekomendasi / hal-hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja guna pencapaian target tahun 2026 sebagai berikut :

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kapal yang beroperasi agar tetap memenuhi ketentuan keselamatan dan kelengkapan dokumen.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian lingkungan
- Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pembuatan PKL dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi awak kapal secara bertahap dan berkelanjutan;
- Menyusun program kerja agen perubahan yang berdampak luas ke *stakeholder*;
- Melakukan pemantauan dan rapat evaluasi realisasi anggaran secara berkala untuk mendeteksi dan menindaklanjuti penyimpangan sejak dini dan melaksanakan akselerasi pelaksanaan pertanggungjawaban tepat waktu.
- Melaksanakan sosialisasi terkait kesesuaian biaya (tarif pelayanan).



PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PRIGI
SOLUTIF

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK). FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Abdul Iman**

Jabatan : Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

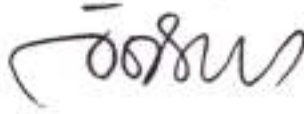
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi


Abdul Iman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp juta)	1.540,58
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	11.671
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	40
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	30,10
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	502
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	76
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	88,50

Data Anggaran:

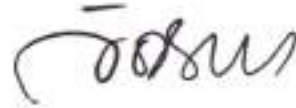
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	802.310.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	1.142.000
3	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.845.967.000
Total Anggaran Tahun 2025		13.649.419.000

Jakarta, 8 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

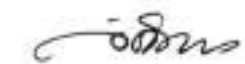
PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi


Abdul Iman

TAHUN 2025[illegible]

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												
								Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
				002.H Operasional Perkantoran dan Pimpinan	1.518.742.000	1	Layanan											1		
				2342.EBA.994.Layanan Perkantoran	12.140.317.000															
				002.I Peningkatan Gedung Dan Ruang Kantor	335.050.000	1	Kegiatan										1			
				2342.EBA.994.Layanan Perkantoran	12.140.317.000															
				002.J Operasional Perkantoran	345.560.000	1	Layanan											1		
				2342.EBD.954. Pelaporan Keuangan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap - Laporan Keuangan dan BMN (Blokir Efisiensi)	-	1	Kegiatan													
				2342.EBD.954.055.Penyusunan LK	-	1	Kegiatan										1			
	16	Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2342.EBD.953. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10.272.000															
				2342.EBD.953.053.A Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran	10.272.000	1	Kegiatan										1			
	17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2338.BGA.002. Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	320.776.000															
				2338.BGA.002.051.H. Kegiatan Forum Konsultasi Publik PPN Prigi TA.2025	1.550.000	1	Kegiatan													
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Jumlah Pagu Setelah Blokir AA		13.167.885.000														

Trenggalek, Desember 2025
Plt. Kepala Pelabuhan



Abdul Iman, S.St.Pi,M.Pi.
NIP. 198303152009011002



SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

Nomor : B.448/DJPT.4/PI.310/II/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

atas prestasinya sebagai
Pelabuhan Perikanan **Peringkat Ketiga** dalam Pelaksanaan Tata Kelola
Lingkungan Pelabuhan Perikanan pada Tahun Anggaran 2024

Jakarta, 12 Februari 2025

DIREKTUR KEPELABUHANAN PERIKANAN



Tri Aris Wibowo



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.363/MEN-KP/III/2025

Penghargaan diberikan kepada:

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Jakarta, 6 Maret 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Nomor B.1097/DJPDSPKP/KP.510/IV/2025

Diberikan Kepada:

PPN PRIGI

Atas Partisipasi dan Kontribusinya dalam Penyampaian Pelaporan
Data dan Informasi ketersediaan Ikan di *Cold Storage* Melalui Sistem
Informasi Pengelolaan *Cold Storage* (SIPCS) dan *Google Form*

JAKARTA, 29 APRIL 2025



Tormanda Syaifullah

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan



SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **114,26**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 KEDIRI
NOMOR KEP-108/KPN.1608/2025



PIAGAM PENGHARGAAN

032.427670-PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI

SEBAGAI SATKER DENGAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN PREDIKAT

TERBAIK

KEDIRI, 25 JULI 2025

KEPALA

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 KEDIRI



Ditandatangani secara elektronik

MOCH. IZMA NUR CHOIRONI





pipp



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Dengan Bangga Diberikan Kepada :

PPN Prigi

.....
untuk hasil penilaian evaluasi kinerja pelabuhan
periode Januari 2025 dengan kategori :

SANGAT BAIK

Jakarta, 8 Februari 2025



Ir. Tri Aris Wibowo, M.Si



pipp

SERTIFIKAT

Penghargaan

Dengan Bangga Diberikan Kepada :

PPN Prigi

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan periode
bulan Februari 2025 dengan kategori :

SANGAT BAIK



Ir. Tri Aris Wibowo, M.Si



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



SERTIFIKAT PENGHARGAAN



DENGAN BANGGA DIBERIKAN KEPADA :

PPN Prigi

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan periode
Maret 2025 dengan kategori :

SANGAT BAIK



Direktur
Kepelabuhanan Perikanan

Dr. Ady Candra, S.Pi, M.Si





SERTIFIKAT

PENGHARGAAN



Dengan bangga diberikan kepada :

PPN Prigi

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan periode
April 2025 dengan kategori :

SANGAT BAIK



Direktur
Kepelabuhanan Perikanan

Dr. Ady Candra, S.Pi, M.Si



SERTIFIKAT PENGHARGAAN



DENGAN BANGGA diberikan kepada :

PPN Prigi

*Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan periode
Mei 2025 dengan kategori :*

SANGAT BAIK



Direktur
Kepelabuhanan Perikanan

Dr. Ady Candra, S.Pi, M.Si



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

DENGAN BANGGA DIBERIKAN KEPADA :

PPN Prigi

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan periode
Juni 2025 dengan kategori :

SANGAT BAIK



DIREKTUR
KEPELABUHAN PERIKANAN

DR. ADY CANDRA, S.PI, M.SI



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Dengan Bangga Diberikan Kepada :

PPN Prigi

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan
periode Juli 2025 dengan kategori :

SANGAT BAIK



DIREKTUR
JENDERAL PERIKANAN

Dr. Ady Candra, S.Pi, M.Si



SERTIFIKAT PENGHARGAAN



Dengan Bangga Diberikan Kepada :

PPN Prigi

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan
periode Agustus 2025 dengan kategori :

SANGAT BAIK



DIREKTUR
KEPELABUHANAN PERIKANAN

Dr. Ady Candra, S.Pi, M.Si



SERTIFIKAT PENGHARGAAN



Dengan bangga diberikan kepada:

PPN Prigi

UNTUK HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PELABUHAN
PERIODE SEPTEMBER 2025
dengan kategori :

SANGAT BAIK

Direktur
Kepelabuhanan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

(Dr. Ady Candra, S.Pi., M.Si)





SERTIFIKAT PENGHARGAAN



Dengan bangga diberikan kepada:

PPN Prigi

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan
periode Oktober 2025
dengan kategori :

SANGAT BAIK

Direktur
Kepelabuhanan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dr. Ady Candra, S.Pi., M.Si



SERTIFIKAT PENGHARGAAN



Dengan bangga diberikan kepada:

PPN Prigi

**Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan
periode November 2025**

dengan kategori :

SANGAT BAIK

Direktur Kepelabuhanan Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. Ady Candra, S.Pi, M.Si





SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Dengan bangga diberikan kepada:

PPN. Prigi

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan
periode Desember 2025

dengan kategori :

SANGAT BAIK

Direktur Kepelabuhanan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dr. Ady Candra, S.Pi., M.Si